



LAPORAN

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NTB TRIWULAN I TAHUN 2021

**BAPPEDA PROVINSI NTB
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahuwata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada Triwulan I tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Evaluasi RKPD disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan evaluasi RKPD merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Provinsi NTB pada Triwulan I tahun 2021 berdasarkan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh hasil capaian sasaran pembangunan daerah belum ada indikator yang memenuhi target, capaian program prioritas rata-rata sebesar 7,83% dan realisasi keuangan mencapai 9,09%. Sementara itu, capaian kegiatan dan sub kegiatan prioritas dengan rata-rata capai kinerja 5,15% dan dan realisasi keuangan mencapai 9,09%. Secara umum, rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran pada triwulan I ini, disebabkan karena sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan II – IV tahun anggaran 2021.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, Mei 2021

KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB



Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP : 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimana pemerintah provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja perangkat daerah Provinsi NTB Tahun 2020 maupun lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023, untuk mengetahui progres dan tingkat capaian secara berkala dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan I merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan pada Triwulan I tahun 2021 mengacu pada RKPD Tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2021, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 269 kegiatan dan 751 sub kegiatan dari total 178 program perangkat daerah dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.834.225.973.367,64 atau 51,26% dari total alokasi belanja daerah sebesar Rp.5.528.931.855.427.

Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh hasil capaian kinerja dan anggaran pada triwulan 1 tahun 2021 dapat dideskripsikan bahwa dari 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2021, berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa terdapat 7 indikator yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 30 indikator yang lain masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 7 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan I 2021 tersebut adalah Nilai Realisasi Investasi, Kontribusi PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan, Inflasi, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Meskipun belum ada indikator yang memenuhi target, namun capaian indikator dari sasaran pembangunan NTB tersebut *on the track*. Adapun terkait 120 Program pembangunan daerah, terdapat 93 program yang sudah dapat dihitung realisasi keuangannya dan 17 indikator diantaranya sudah dapat dihitung realisasi kinerjanya dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 7,83% dan realisasi keuangan mencapai 9,09%. Sementara itu, dari 281 Kegiatan yang ada pada 120 program, terdapat 155 kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi keuangannya. Adapun sub kegiatan sebanyak 839 sub kegiatan, terdapat 390 Sub Kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi

kinerja dan keuangannya dengan rata-rata capai kinerja 5,15% dan dan realisasi keuangan mencapai 9,09%. Secara umum, rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran pada triwulan I ini, disebabkan karena sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan II – IV tahun anggaran 2021.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **Error! Bookmark not defined.**

RINGKASAN..... i

DAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Tujuan 2

 1.4 Sasaran 3

 1.5 Sistematika Penulisan Laporan 3

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2021 4

 2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2021 4

 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2021..... 5

 2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2021..... 6

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN
DAERAH DAERAH TAHUN 2021.....10

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021
TRIWULAN I.....30

 4.1 Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja dan anggaran Perangkat Daerah pada
 Triwulan I Tahun 2021..... 30

 4.2 Permasalahan..... 75

BAB V : PENUTUP76

 5.1 Kesimpulan 76

 5.2 Rekomendasi..... 77

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat baik dalam skala nasional maupun regional.

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. RKPD Tahun 2021 merupakan perencanaan tahunan ketiga penjabaran RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang diarahkan pada upaya pemulihan sosial ekonomi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19, peningkatan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, menjaga stabilitas makro ekonomi, serta memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dengan demikian diharapkan seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam mewujudkan dan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 261 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Laporan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah berdasarkan sasaran pembangunan pada Triwulan I tahun 2021 mengacu pada RKPD Tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020. Apabila berdasarkan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya maka BAPPEDA bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan baik pada pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan berikutnya maupun sebagai bahan bagi penyusunan RKPD provinsi untuk tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja sasaran pembangunan dan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2021;
2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
3. Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD Tahun 2020 ini adalah untuk mengukur capaian Sasaran Pembangunan dan program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2021.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2021 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan laporan;
- Bab II : Prioritas, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2021. Bab ini berisi tentang prioritas sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021;
- Bab III : Rencana Program Prioritas Tahun 2021. Bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2021.
- Bab IV : Capaian Target Kinerja Pembangunan Triwulan I Tahun 2021. Bab ini berisi Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas serta Penyerapan Anggaran Tahun 2021 Triwulan I.
- Bab V : Penutup

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2021

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2021 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang", Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut:

Misi 1 "NTB TANGGUH DAN MANTAP" melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;

Misi 2 "NTB BERSIH DAN MELAYANI" melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;

Misi 3 "NTB SEHAT DAN CERDAS" melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;

Misi 4 "NTB ASRI DAN LESTARI" melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

Misi 5 "NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI" melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;

Misi 6 "NTB ADIL DAN BERKAH" melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Adapun tujuan pembangunan NTB Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.
7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul.
10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

Berdasarkan tujuan pembangunan, maka sasaran pembangunan NTB Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatnya Profesionalisme ASN.
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
10. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
12. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
13. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
14. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
15. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin .
16. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
17. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
18. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
19. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
20. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
21. Meningkatnya Daya Saing Industri.
22. Menurunnya Pengangguran Terbuka.
23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
25. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2021 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan NTB yaitu "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang".

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi:

1. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19, dengan strategi :
 - a. Penguatan sektor Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19
 - b. Jaringan Pengaman Sosial bagi masyarakat miskin
 - c. Penanganan dampak ekonomi Pandemi COVID-19.
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, dengan strategi :

- a. Pengembangan Sektor Pariwisata.
 - b. Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian, Kehutanan, Pertambangan dengan pola kemitraan.
 - c. Mengoptimalkan Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
 - d. Mengembangkan Kawasan Strategis Mandalika, Samota, Kawasan Industri SMELTER dan Industri turunannya di Maluk. La-SAKOSA serta Global Hub Bandar Kayangan).
 - e. Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, energi dan konektivitas wilayah.
3. Menjaga stabilitas makro ekonomi, dengan strategi :
- a. Mengendalikan inflasi.
4. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan strategi:
- a. Mendorong Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kab/Kota.
 - b. Mendorong Pemerataan Tingkat Pendapatan Masyarakat.
 - c. Mendorong Penurunan Tingkat Kemiskinan.
 - d. Memperluas Akses dan Kesempatan Kerja.
 - e. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2021

Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2021 yaitu **“Menuju NTB Gemilang dengan Membangun Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Industri, Pariwisata, Investasi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah”**.

Adapun Prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2021 yaitu :

- 1. Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah
- 2. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik
- 3. Pembangunan Sumber Daya Manusia
- 4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- 5. Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata
- 6. Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Target Pembangunan berdasarkan sasaran pembangunan tahun 2021 disajikan dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 2.1. Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana			Point	123.11
				Meningkatnya kapasitas dalam	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.61

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
	bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas	penanggulangan bencana			
						Point	78.56
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	83.95
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50.04
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81.71
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	B
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35.41
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (73,01 - 76,00)
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.68
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.23
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	71.97
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	66.78
					Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	31.49
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	62.39
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.68
					Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.01
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	67.72
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	42.83
					Indeks Kualitas Udara	Point	87.53
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	87.60
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	67.70

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
			Neraca pengelolaan sampah			%	70.00
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	50.00
					Persentase Pengurangan Sampah	%	20.00
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	73.80
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	13,362
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.52
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.20
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	76.48
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.1
					Rasio Elektrifikasi	%	99.77
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62.65
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11,273
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)			%	1.50
				Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	122.71
						%	6.50

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2021
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri	Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	166.39
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.30
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	14.85
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	16.67
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.41
			Partisipasi politik masyarakat			%	83.74
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.80
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	59.81
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18.60
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2021

Program pembangunan daerah didasarkan pada program yang mendukung sasaran pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagaimana telah dituangkan dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2021. Adapun program pembangunan daerah pada tahun 2021 sebanyak 120 program dari 163 Program perangkat daerah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penanganan Bencana
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
6. Program Pengelolaan Pelayaran
7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Program Penyelenggaran Pengawasan
10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
11. Program Pengelolaan
Keuangan Daerah
12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
13. Program Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
14. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Program Penataan Organisasi
16. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
17. Program Kepegawaian Daerah
18. Pengembangan Sumber Daya Manusia
19. Program Pendaftaran Penduduk
20. Program Pencatatan Sipil
21. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
22. Program Peningkatan Kerjasama Desa
23. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
24. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
25. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
26. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

27. Program Perencanaan Tenaga Kerja
28. Program Pembinaan Perpustakaan
29. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
30. Program Pelayanan Penghubung
31. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
32. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
33. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
34. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
35. Program Pengelolaan Pendidikan
36. Program Pengembangan Kurikulum
37. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
38. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
39. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
40. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
41. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
42. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
43. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
44. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
45. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
46. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
47. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
48. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
49. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
50. Program Pengelolaan Hutan
51. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
52. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
53. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
54. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
55. Program Pengelolaan Persampahan
56. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
57. Program Promosi Penanaman Modal
58. Program Pelayanan Penanaman Modal
59. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
60. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
61. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
62. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
63. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
64. Program Penyuluhan Pertanian
65. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
66. Program Pengelolaan Hutan

67. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
68. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
69. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
70. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
71. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
72. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
73. Program Rehabilitasi Sosial
74. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
75. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
76. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
77. Program Penanganan Kerawanan Pangan
78. Program Pengawasan Keamanan Pangan
79. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
80. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
81. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
82. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
83. Program Pengembangan Perumahan
84. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
85. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
86. Program Pengembangan Ekspor
87. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
88. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
89. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
90. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
91. Program Pemasaran Pariwisata
92. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
93. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
94. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
95. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
96. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
97. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)
98. Program Pengembangan Umkm
99. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
100. Program Penempatan Tenaga Kerja
101. Program Hubungan Industrial
102. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
103. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
104. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
105. Program Kesejahteraan Rakyat
106. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

107. Program Pengembangan Kebudayaan
108. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
109. Program Pembinaan Sejarah
110. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
111. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
112. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
113. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
114. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
115. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
116. Program Perlindungan Perempuan
117. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
118. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
119. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
120. Program Perlindungan Khusus Anak

Adapun Program prioritas dan program unggulan daerah yang dipetakan berdasarkan prioritas daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah, dengan program prioritas meliputi :

- a. Mitigasi bencana.
- b. Infrastruktur dasar.
- c. Infrastruktur kawasan.
- d. Konektivitas wilayah.
- e. Teknologi informasi dan komunikasi

Sedangkan program unggulannya antara lain: Desa Tangguh Bencana, Sekolah Siaga Bencana, Si-AGA, Rumah Layak Huni, Air Bersih untuk Semua, SPAM regional, Jamban Keluarga, percepatan jalan mantap, irigasi cukup, NTB terkoneksi, dan Nusa Terang Benderang.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik , dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Keandalan Perencanaan
- b. Optimalisasi Pendapatan daerah
- c. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah
- d. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Daerah

Sedangkan program unggulannya antara lain: eNTeBe Plan, NTB SDGs *centre, Research Based Policy*, IC pusat peradaban, NTB WTP, e-Samsat, Samsat Delivery, Bale Mediasi, Kampung Madani, Kampung Media, Sekolah Perjumpaan, NTB Satu Data, Satu Peta, Sakip level A, NTB *care*, Kota Layak Anak, Ramah *Difable*, Manajemen Talenta dan Agen Perubahan.

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan program prioritas meliputi :

- a. Pemerataan Pendidikan
- b. Akses Pelayanan Kesehatan

- c. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah
- d. Perlindungan Sosial

Sedangkan program unggulannya antara lain: Ayo Bercita-cita, 1000 Mahasiswa Luar Negeri, Re-engineering SMK, Rumah bahasa, revitalisasi BLK, PAUD holistik integratif, literasi digital, revitalisasi posyandu, generasi emas NTB, sanitasi layak, dan NTB juara.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
- c. Peningkatan Daya Dukung SDA
- d. Peningkatan Daya Tampung Lingkungan

Sedangkan program unggulannya antara lain: Tataruang Berkelanjutan, NTB *Zero Waste*, NTB hijau, Cagar Biosfer, Energi Baru Terbarukan, Pertanian Lestari, Desa Mandiri Pangan, Rinjani Tambora Global Geopark, Bank Sampah, Taman Asri.

5. Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata, dengan program prioritas meliputi :

- a. Pengentasan Kemiskinan
- b. Peningkatan investor sektor riil
- c. Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian
- d. Pengembangan Pariwisata
- e. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
- f. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

Sedangkan program unggulannya antara lain: Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Desa, STIP Inovatif, Industrialisasi Produk Pertanian, Rumah Kemasan, Koperasi Aktif, BUMDes Maju, UMKM Bersaing, NTB Ramah Investasi, Kampung Unggas, HHBK Unggul, 99 Desa Wisata, Apartemen Ikan.

6. Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, dengan program prioritas meliputi :

- a. Peningkatan Nilai Sosial Budaya dan Toleransi masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas dan penegakan produk hukum daerah
- c. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat
- d. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Sedangkan program unggulannya antara lain: IC pusat peradaban, , Bale Mediasi, Kampung Madani, Sekolah Perjumpaan, Kota Layak Anak.

Pemetaan program Pembangunan Daerah kedalam sasaran pembangunan pada tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Program Pembangunan Daerah Kedalam Sasaran Pembangunan Pada Tahun 2021

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah					
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point	123.11		
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.61		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	25.48	4,159	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	44.69		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	2,446	Dinas Sosial
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas	Point	78.56		
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan jalan	%	83.95		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	83.95	255,582	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50.04		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	74.55	172,161	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81.71		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	50.83	4,436	Dinas Perhubungan
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	94.37		
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	30		
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	46.20		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	59.39	564	Dinas Perhubungan
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi					
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	711,669	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100	1,050	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	60	1,777	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	80	1,079	INSPEKTORAT
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	40	2,119	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	5.55	397	INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	95	1,571	
Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	35.41		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	35.20	528	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	50.12	14,608	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (73,01 - 76,00)		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	4,234	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	11,089	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya	%	84.44	827	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	17,77	717	INSPEKTORAT
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%	80	1,148	Biro Organisasi

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	2,834	Biro Pemerintahan
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.68		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	16	6,500	Badan Kepegawaian Daerah
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan		80		
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi		88		
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan		132		
	Nilai Aspek Sistem Informasi		16		
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0.09	16,446	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0.03		
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0.13		
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0.55		
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.23		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%	98,70	243	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	181	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%	100	871	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkar hutan dan pesisir	%	15	48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media	%	60	4,644	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)				
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	45	1,707	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	20	420	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	30	409	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	75	85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	977	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	179	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang			Badan Penghubung Daerah
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah					
Tujuan 3: Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan	Point	71.97		
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	66.78		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	150,430	Dinas Kesehatan
	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	97		
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar	%	65		
	Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100		
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan	%	80		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	tidak menular sesuai standar minimal 80%				
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	94		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%	100		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2	761	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	30	32	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	83	52,458	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	73.81	7,479	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	75.00	36,664	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting	%	31.49		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting	%	12.41		Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	50	1,228	Dinas Kesehatan
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan	Point	62.39		
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.68		
	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.01		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	99.15	473,403	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	93,40		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	96.68		
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	69.4		
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1.01		
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	1:18		
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:14		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	568	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	66,961	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	99.55		
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	70		
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	50		
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		5.5		
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	100	61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	35	200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	3,245	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Altlet Berprestasi	%	100	8,846	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan					
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	67.72		
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	42.83		
	Indeks Kualitas Udara	Point	87.53		
	Indeks Kualitas Air Laut	Point	87.60		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	51.52	319	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	882	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	1	24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/ kegiatan	20	188	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%	10	197	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok	0	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	20	200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	67.70		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	67	19,206	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30,503	885	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	13.27	661	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4.00	4,449	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	89.07	681	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Neraca pengelolaan sampah (%)	%	70.00		
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	50.00		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	Persentase Pengurangan Sampah	%	20.00		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	70	4,823	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi					
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli (Point)	%	73.80		
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	13,362		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perentase Peningkatan Minat Investasi	Persen	3	493	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	100	715	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	87	531	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen	50	735	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	116	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.52		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%	9	44,458	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%	100	561	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS	%	< 1	2,779	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	420	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	%	1.93	20,209	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%	35.41	104,379	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	2		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	95.5	361	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	50	5,432	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	8.53	4,868	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	241,843	6,336	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1,195,104	3,023	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	99.91	4,852	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	213130	616	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	100		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	764	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	2.5	17,317	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	12,091	Dinas Sosial
Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.20		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%	71.97	215	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	3,517	Dinas Ketahanan Pangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	5.77	358	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	80.00	539	Dinas Ketahanan Pangan
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	76.48		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	76.48	2,936	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.10		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	94.00		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	84,393	256,813	Dinas Perumahan dan Permukiman
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi	%	99.77		
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5.96	557	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar	%	99.77	1,552	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62.65		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	1,943	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Rumah tangga menempati hunian layak	%	98.81		
Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%	60	280	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	1,658	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	3	1,303	Dinas Perdagangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	80	1,253	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	12,024	Dinas Perdagangan
Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp.000	11,273		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	3,704	Dinas Perdagangan
Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%	1.50		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	122.71		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	65.66	4,993	Dinas Pariwisata
	Persentase Geosite yang tertata	%	37.5		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang	4,650,000	2,240	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%	30.21	165	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%	60	1,063	Dinas Pariwisata
Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri (%)	%	6.50		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	166.39		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	27,070	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%	2.69	799	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem	%	1	540	Dinas Perindustrian

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
	Informasi Industri Nasional				
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	5.99	1,280	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	50.32	2,122	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	3,245	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		
Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.30		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	16	830	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	44.71	992	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	21	300	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	21	1,014	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan					
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas	Point	14.85		
Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	16.67		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	458	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	10	3,328	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	87,427	Biro Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Persentase Lembaga Adat Aktif	%	60	6,798	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Bumdes Berprestasi	%	14.43		
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%	60		
	Persentase Posyantek yang aktif	%	47.86		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	63.64	1,975	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	390	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%	100	164	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.41		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100.00	2,864	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100.00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	51.72	730	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	1,711	Biro Hukum
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%	100		
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100		
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100		
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100		
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%	83.74		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.80		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	80	4,654	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%	79.66	489	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	59.81		
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18.6		
	Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	60		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	52.17	1,769	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	75.52	806	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	5	381	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender		1	35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80.00	361	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		518	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	
					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%			

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021 TRIWULAN I

4.1 Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja dan anggaran Perangkat Daerah pada Triwulan I Tahun 2021

Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2021, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 269 kegiatan dan 751 sub kegiatan dari total 178 program perangkat daerah dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.834.225.973.367,64 atau 51,26% dari total alokasi belanja daerah sebesar Rp. 5,528,931,855,427.

Adapun hasil capaian kinerja dan anggaran pada triwulan 1 tahun 2021 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Dari 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2021, berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa terdapat 7 indikator yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 30 indikator yang lain masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 7 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan I 2021 tersebut adalah Nilai Realisasi Investasi, Kontribusi PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan, Inflasi, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Meskipun belum ada indikator yang memenuhi target, namun capaian indikator dari sasaran pembangunan NTB tersebut *on the track*.
2. Dari 120 Program pembangunan daerah tersebut, terdapat 93 program yang sudah dapat dihitung realisasi keuangannya dan 17 indikator diantaranya sudah dapat dihitung realisasi kinerjanya dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 7,83% dan realisasi keuangan mencapai 9,09%.
3. Dari 281 Kegiatan, terdapat 155 kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi keuangannya. Adapun sub kegiatan sebanyak 839 sub kegiatan, terdapat 390 Sub Kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi kinerja dan keuangannya dengan rata-rata capai kinerja 5,15% dan dan realisasi keuangan mencapai 9,09%.

Adapun rekapitulasi hasil capaian kinerja dan keuangan menurut pemetaan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. **Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana** dengan indikator kinerja Indeks Kapasitas Daerah. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan

sebesar 5,88 % pada pada capaian kinerjanya dan 10,30 % pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Penanggulangan Bencana pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB dan Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna dengan target kinerja 25,48% dan 44,69%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (sub kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; Penanganan Pascabencana Provinsi, Penyusunan Rencana Kontijensi), Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (sub kegiatan : Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana; Pencarian, Pertolongan, Evakuasi Korban Bencana; Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana) dan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (sub kegiatan : Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan).
 - b. Program Penanganan Bencana pada Dinas Sosial dengan indikator kinerja Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi dengan target kinerja sebesar 100 %. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Pelayanan Dukungan Psikososial.
2. **Sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar** dengan indikator kinerja Persentase Kemantapan jalan. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 19,24 % pada capaian keuangannya.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator kinerja yaitu Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap dengan target kinerja sebesar 83,95%. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jembatan, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.
3. **Sasaran Meningkatnya pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar** dengan indikator kinerja yaitu Persentase Kemantapan Sistem Irigasi. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 42 % pada capaian keuangannya.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator kinerja yaitu Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi dengan target kinerja sebesar 74,55%. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya; Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA

WS Kewenangan Provinsi; Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku; Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing; Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya; Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi; Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi) dan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Ha - Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa;Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah;Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya;Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai;Rehabilitasi Bendung Irigasi;Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi;Operasional Unit Pengelola Irigasi).

4. **Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah** dengan indikator kinerja Persentase konektivitas transportasi publik. Rata-Rata Capaian Kegiatan/ Sub Kegiatan sebesar 10,81 % pada capaian kinerjanya dan 4,32 % pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
 - a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik (target kinerja 50,83 %), Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (target kinerja 94,37 %), Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik (target kinerja 30 %), Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik (target kinerja 46,2 %). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan) Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B; Pembangunan Gedung Terminal; Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)), Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Sub Kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi dan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas kebijakan jalan provinsi), Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal), Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi; Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Provinsi), Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Perumusan

- Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi; Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi), Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi).
- b. Program Program Pengelolaan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan indikator kinerja yaitu Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik (target kinerja 59,39 %). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas), Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan "Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi

dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/ Kota"), Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional), Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional).

5. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dengan indikator kinerja Opini BPK. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 11,57 % pada capaian kinerjanya dan 16,01 % pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi (target kinerja 100 %), Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota (target kinerja 100 %). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKP; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKP; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD; Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran; Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan; Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah; Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan; Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi; Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.
- b. Program Program Pengelolaan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan indikator kinerja yaitu Sarana dan prasarana transportasi Laut dalam kondisi baik (target kinerja 59,39 %). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan

Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas), Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan "Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/ Kota"), Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional), Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan: Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional).

6. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 2,1 % pada capaian kinerjanya dan 5,71 % pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Derajat Desentralisasi Fiskal dengan target kinerja 35.2 %. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan sub kegiatan : Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.

- b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK) dengan target kinerja sebesar 50.12 %. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; Penetapan Wajib Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; Penagihan Pajak Daerah; Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

7. Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dengan indikator kinerja Nilai SAKIP. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 14,28 % pada capaian kinerjanya dan 23,48 % pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator kinerja Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan dengan target kinerja 100 %. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (dengan sub kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah; Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya; Pelaksanaan Konsultasi Publik; Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD; Pelaksanaan Musrenbang Provinsi; dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi); Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (dengan sub kegiatan: Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD; dan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota); Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (dengan sub kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi; Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah; Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota).
- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dengan target kinerja sebesar 100 %. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia); dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA); Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan).
- c. Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Inspektorat dengan indikator kinerja Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya dengan target kinerja sebesar 84.44%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; Reviu Laporan Kinerja; dan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota.

- d. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi pada Inspektorat dengan indikator kinerja Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM dengan target kinerja sebesar 17,77%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi; dan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
- e. Program Penataan Organisasi pada Biro Organisasi dengan indikator kinerja Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat dengan target kinerja yaitu Nilai BB. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan (sub kegiatan : Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi; Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan Penataan Analisis Jabatan) dan Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (sub kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja; Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan; dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik).
- f. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah dengan indikator kinerja Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan (sub kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan; Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum; dan Fasilitasi Penataan Wilayah), Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah (sub kegiatan : Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan; dan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan) dan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah (sub kegiatan : Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah; Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta; dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama).

8. Sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN dengan Indikator Kinerja Indeks Profesionalisme ASN. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 7,03 % pada capaian kinerjanya dan 9,62 % pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Kepegawaian Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja Nilai Aspek Sistem Informasi (target capaian: 16%); Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan (target capaian: 80%); Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi (target capaian: 88%); Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan 132%); dan Nilai Aspek Sistem Informasi (target capaian: 16%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (sub kegiatan : Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN; Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN; Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK; Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN; Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN; Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian; Evaluasi Pemberhentian ASN; Fasilitasi

Lembaga Profesi ASN; Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN; Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; Pengelolaan Data Kepegawaian; dan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian); Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN (Sub Kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN; Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN; dan Pengelolaan Promosi ASN); Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN (sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN; Pengelolaan Assessment Center; Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN; Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN; Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat; Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN; Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN; Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional; Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN; Pembinaan Jabatan Fungsional ASN; Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional; dan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional), Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai; Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai; Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur; Pembinaan Disiplin ASN; Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN; Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai; dan Evaluasi Disiplin ASN).

- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator kinerja Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial (target kinerja : 0.086%); Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional (target kinerja : 0.033%); Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis (target kinerja : 0.13%); dan Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi(target kinerja : 0.55%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi : Kegiatan Pengembangan Kompetensi Tekhnis (sub kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; dan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum) dan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (sub kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan

Fungsional; Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi; Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga; Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan; dan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan).

- 9. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat** dengan Indikator Kinerja Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 8,34 % pada capaian kinerjanya dan 6,37 % pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
- Program Pendaftaran Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk (target capaian: 98,7%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi : Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan (sub kegiatan : Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional; dan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi); Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan (Sub Kegiatan : Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk; dan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk).
 - Program Pencatatan Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Pelayanan Pencatatan Sipil dengan sub kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil.
 - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; dan Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi); Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi (sub kegiatan :

- Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan).
- d. Program Peningkatan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkaran hutan dan pesisir (target capaian: 15%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
 - e. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (target capaian: 60%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik; Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Pelayanan Informasi Publik; Layanan Hubungan Manusia; Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah; Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas; dan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.
 - f. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Persentase Layanan Berbasis TIK (target capaian: 45%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan meliputi Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi; Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah; dan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik).
 - g. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (target capaian: 20%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Provinsi dengan sub kegiatan meliputi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Dieminasi Data Statistik Sektorial; Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi; Membangun Metadata Statistik Sektorial; Peningkatan Kapastitas Kelembagaan Statistik Sektorial; dan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektorial di Daerah).
 - h. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%) (target capaian: 20%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi; Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan

Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi; Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik; dan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi); dan Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi).

- i. Program Perencanaan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator kinerja Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja (target capaian: 75%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.
- j. Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik; Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi; Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan; Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka; dan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi.
- k. Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik; Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi; Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan; Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka; dan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi).
- l. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi (sub kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam); Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah (sub kegiatan : Penerbitan Katalog Induk Daerah; dan Penerbitan Bibliografi Daerah); Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno; dan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan).

10. Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat dengan Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 14,59 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi (target capaian: 85%), Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (target capaian: 97%); Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar (target capaian: 65%); Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB (target capaian: 100%); Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80% (target capaian: 80%); Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar (target capaian: 94%); dan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional (target capaian: 100%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); dan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus; Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; Pengelolaan Surveilans Kesehatan; Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota; Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan; Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas; Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota; Operasional Pelayanan Rumah Sakit; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik; Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional; Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan); Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi; Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi

- Kesehatan; dan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet); Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub Kegiatan : Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit); Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) dan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan) ; Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan).
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya (target capaian: 2%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi (sub kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan); Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan).
 - c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (target capaian: 30%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK); dan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional).
 - d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target (target capaian: 83%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarpras dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM & UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan kesehatan.
 - e. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target (target capaian: 73,81%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit; dan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas

Kesehatan Lainnya); Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus; dan Operasional Pelayanan Rumah Sakit); dan Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan).

- f. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target (target capaian: 75%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan); dan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit).

11.Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase Balita Stunting. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 13,10 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase balita Wasting (target capaian: 12,41. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (target capaian: 50%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi); Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat); Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM).

12.Sasaran Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dengan Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (Target: 13,68 Tahun) dan Rata rata Lama

Sekolah Target : 7,01 Tahun). Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 6,52 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (Target kinerja : 99.15 %); Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (Target kinerja : 93,408 %); Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah (Target kinerja : 96.68%); Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB (Target kinerja : 69.4%); Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah (Target kinerja : 1.01 %); Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah (Target kinerja : 1:18); dan Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB (Target kinerja : 1:14). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (sub kegiatan : Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru); Penambahan Ruang Kelas Baru; Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah; Rehabilitasi Asrama Sekolah; Pengadaan Mebel Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas); Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (sub kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Sekolah; Pembangunan Ruang Praktik Siswa; Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah; Pengadaan Mebel Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Sekolah;Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik; Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan;Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan); Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus (sub kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik;Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus;Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus;Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus).
- b. Program Pengembangan Kurikulum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kurikulum (Target kinerja : 99.15%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penetapan Kurikulum Muatan

- Lokal Pendidikan Menengah dengan sub kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah; dan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah.
- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV (Target kinerja : 100%); Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV (Target kinerja : 99.55%); Persentase Kepala Sekolah bersertifikat (Target kinerja : 70%); Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat (Target kinerja : 50%); Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) (Target kinerja : 5,5%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Provinsi dengan sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
 - d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (sub kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat); Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (sub kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat).
 - e. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan (Target kinerja : 35%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi.
 - f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator kinerja Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi; Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera; Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi; Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi; dan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.

- g. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator kinerja Presentase Pembinaan Atlet Berprestasi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi); Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (sub kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi; dan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event); Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (sub kegiatan : Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)); dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan (sub kegiatan : Pengembangan Organisasi Keolahragaan).

13. Sasaran Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Laut. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 16,95 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun (Target kinerja : 51,52 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi; dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi); Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (sub kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang; Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD; dan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup).
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya (Target kinerja : 10 lokasi). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi); Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Pembuatan (sub kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat).
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa (Target kinerja : 1 lokasi). Adapun kegiatan yang

- dilakukan yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya (Target kinerja : 210 unit). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengumpulan Limbah B Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.
 - e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan (Target kinerja : 20 kegiatan). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
 - f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan (Target kinerja : 105). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.
 - g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (Target kinerja : 20 Pengaduan). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.

14.Sasaran Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air ,Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Laut. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 8,83 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi kelola (Target kinerja : 66,74 %) dan Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola (Target kinerja : 10 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan

- Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung; dan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan) ; Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL); Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara; Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara; dan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan); Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (sub kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan; dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (sub kegiatan : Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati; dan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun (sub kegiatan : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun)
- b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi (Target kinerja : 30503.3 Ha). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi (sub kegiatan : Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi; Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi; Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi; Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi; Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi; dan Perencanaan Pengelolaan TAHURA); Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES); Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan

- Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi; dan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi).
- c. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase KTH yang meningkat kelasnya (Target kinerja : 13,27%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan; Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan; dan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial.
 - d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas (Target kinerja : 4 DAS). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS; Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS; dan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS.
 - e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Target kinerja : 89,07%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (sub Kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota); Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dan Sistem Informasi Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang).

15. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dengan Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 21,21 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

Program Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase pengelolaan sampah (Target kinerja : 70 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional dengan sub kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional; Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus; Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan

Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional; dan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional).

16.Sasaran Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan dengan Indikator Kinerja Nilai Realisasi

Investasi. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 6,32 % pada pada capaian kinerjanya dan 8,96 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Perentase Peningkatan Minat Investasi (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman); dan Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi; dan Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi).
- b. Program Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi; dan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi.
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan (Target kinerja : 87 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/ kota (sub kegiatan : Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik); dan Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi (sub kegiatan : Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik; Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal; dan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan).
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah (Target kinerja : 50 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal; Koordinasi dan sinkronisasi

- pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Urusan pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

- 17. Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas** dengan Indikator Kinerja Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 1,52 % pada pada capaian kinerjanya dan 5,10 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Pertumbuhan Populasi Ternak (Target kinerja : 9 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor (sub kegiatan : Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan; dan Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan); Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (sub kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain; dan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain); Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi; dan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi); Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak; Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan; dan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak); Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan).
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penataan Prasarana Pertanian (sub kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan; dan Pembangunan, Rehabilitasi dan

- Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya); Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Terna; dan Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak)
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi Phms (Target kinerja : <1%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis; Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; dan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular); Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan; Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan; dan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi); Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan (sub kegiatan : Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit; Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan; dan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner); Kesejahteraan Hewan (sub kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya).
- d. Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian); dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan (sub kegiatan : Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna; Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani;Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani; dan Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani).
- e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitas Sarana Pertanian (Target kinerja : 1,93%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (sub kegiatan : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian); dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman (sub kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih; dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran

- Benih/Bibit Hortikultura; Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan; dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan).
- f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian (Target kinerja : 35,41%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penataan Prasarana Pertanian dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya; dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.
 - g. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian (Target kinerja : 35,41%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
 - h. Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok (Target kinerja : 35,41%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN; dan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta); dan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani).
 - i. Program Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola (Target kinerja : 10%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung; dan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan); Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL); Pembangunan Hutan Rakyat di Luar

- Kawasan Hutan Negara; Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara; dan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan); Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (sub kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan; dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (sub kegiatan : Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati; dan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun (sub kegiatan : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun).
- j. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Target kinerja : 8,53%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (sub kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat; Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil); Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi; dan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi).
- k. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap (Target kinerja : 241843 Ton). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan Mil (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan; Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap; Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap); Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas GT Sampai Dengan GT (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT; Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT; Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT); Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil; dan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh nelayan kecil); Penerbitan

- Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT; dan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT); Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (sub kegiatan : Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan; Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan); Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas GT sampai dengan GT (sub kegiatan : Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT); Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas GT Sampai Dengan GT (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas GT Sampai Dengan GT; Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT; Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan GT).
- l. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi Perikanan Budidaya (Target kinerja : 1195104 Ton). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan); Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (sub kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di laut; Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut; Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi).
 - m. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan (Target kinerja : 99,91%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Mil dengan sub kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan Mil; Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan Mil; Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan mil)

n. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi olahan hasil perikanan (Target kinerja : 213130 ton). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (satu) daerah provinsi; dan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (sub kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing); Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi; dan Pemberian insentif bagi pelaku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah).

18.Sasaran Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin

dengan Indikator Kinerja Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%). Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 7,69 % pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi (Target kinerja : 85 %). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan); Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan); Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi); Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan); Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan).

- b.** Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.
- c.** Program Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani (Target kinerja : 2,5 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Alat Bantu; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar); Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (sub kegiatan : Pengasuhan; Penyediaan Makanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial; Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar ; Anak Terlantar di dalam Panti); Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama yang mudah Diakses; Penyediaan Alat Bantu; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga; Pemulasaraan); Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar; Pemulangan ke Daerah Asal; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti); Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; emberian Bimbingan Keterampilan Dasar; Pemulangan ke Daerah Asal; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA).

- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (sub kegiatan : Pengangkatan Anak antar WNI; Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal); dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi (Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat).

19. Sasaran Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan dengan Indikator Kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 1,27 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan (Target kinerja : 71,97%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan; Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur; dan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (sub kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan; Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan; Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan); Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi); Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi (sub kegiatan : Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BSA)).
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) (Target kinerja : 5,77%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi; dan

Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi'

- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%) (Target kinerja : 80%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi; Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan).

20. Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Cakupan Air Minum. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 11,64 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator Kinerja Cakupan air minum (Target kinerja : 76,48%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; dan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan.

21. Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 39,72 % pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar (Target kinerja : 94%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
- b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) pada Dinas Perumahan dan Permukiman dengan indikator Kinerja Luas kawasan permukiman yang berkualitas (Target kinerja : 84392,8 Ha). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman; dan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.

22. Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar

50,11 % pada pada capaian kinerjanya dan 2,08% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengelolaan Energi Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator Kinerja Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik (Target kinerja : 5,96%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun; Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun); Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi (sub kegiatan : Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi; Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi ; Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi).
- b. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator Kinerja Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar (Target kinerja : 99,77%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penatausahaan Izin Usah Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi; dan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi); Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi; dan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi); Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Pedesaan (sub kegiatan : Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu; dan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan).

23.Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Cakupan Rumah Layak Huni (RLH). Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 3,21% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

Program Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman dengan indikator Kinerja Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana; Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi); Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana; dan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP); dan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana).

24.Sasaran Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok dengan Indikator Kinerja Inflasi. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 5,61% pada capaian kinerjanya dan 1,60% pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting" (Target kinerja : 60%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor (sub kegiatan : Fasilitasi pemenuhan komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik); Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik); Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar (Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya; dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya); Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) (sub kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana) (sub kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA).
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok (Target kinerja : 4%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang

- Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor); Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan (sub kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota; dan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi); Pengawasan Pupuk Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan penggunaan Pupuk Berbsubsidi di Wilayah Kerjanya dalam sistem informasi perdagangan (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida;Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi;Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi; dan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi).
- c.** Program Pengembangan Ekspor pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang (Target kinerja : 3%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada (satu) daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan Pameran Dagang Internasional/ Nasional; Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor ; Misi Dagang Bagi Pelaku Ekspor Unggulan ; Pameran Dagang Lokal; Peningkatan Citra Produk Ekspor).
 - d.** Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Penyelesaian Sengketa (Target kinerja : 80%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen;Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen;Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen); Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen; Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan dan/jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen_; dan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Verifikasi Mutu Produk; Pengembangan Layanan Pengujian; Pengembangan Layanan Sertifikasi; Pengembangan Layanan Kalibrasi).
 - e.** Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri (sub kegiatan : Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi); Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (sub kegiatan : Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi); dan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (sub kegiatan : Sosialisasi

peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; dan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan).

25.Sasaran Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan Indikator Kinerja Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 0,32% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas dengan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi; Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi; dan Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

26.Sasaran Meningkatnya daya saing pariwisata dengan Indikator Kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar). Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 2,07% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dengan indikator Kinerja Persentase desa wisata yang dikembangkan (Target kinerja : 65,66%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Kawasan Strategis pariwisata Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi); Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan destinasi pariwisata provinsi); Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata).
- b. Program Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dengan indikator Kinerja Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan (Target kinerja : 4.650.000 orang). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan sub kegiatan Penguatan promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri; Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri; Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Dinas Pariwisata dengan indikator Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif (Target kinerja : 30,21%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif dengan sub kegiatan Perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik ; Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan

- ruang kreasi dan jaringan orang kreatif; dan Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula.
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dengan indikator Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar (Target kinerja : 60%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan dengan sub kegiatan Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan; Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kamitraan pariwisata; Pelatihan berbasis kompetensi bidnag homestay dan pemandu wisata (tour guide) tingkat lanjutan.

27.Sasaran Meningkatnya daya saing industri dengan Indikator Kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar). Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 2,13% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna Industri Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional (Target kinerja : 1%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi

melalui SIINas; Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas.

- d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator Kinerja Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha (Target kinerja : 5,99%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.
- e. Program Pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator Kinerja Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya (Target kinerja : 50,32%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dengan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.
- f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator Kinerja Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi (Target kinerja : 100%); dan Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi; Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera; Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi; Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi; Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.

28.Sasaran Menurunnya pengangguran terbuka dengan Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 8,79% pada pada capaian kinerjanya dan 5,11% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi (Target kinerja : 16%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (sub kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi); Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (sub kegiatan : Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja); Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (sub kegiatan : Proses

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (DBHCHT)); Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja).

- b.** Program Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan (Target kinerja : 44,71%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota (sub kegiatan : Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal)); Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (sub kegiatan : Job Fair / Bursa Kerja); Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia; Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran; Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan);Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi).
- c.** Program Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial (Target kinerja : 21%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi ; Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi); Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK) (sub kegiatan : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan UMK).
- d.** Program Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3 (Target kinerja : 21%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan;Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan; Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan).

29.Sasaran Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase penurunan konflik sosial. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 6,96% pada pada capaian kinerjanya dan 8,59% pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a.** Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase

- pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik (Target kinerja : 10%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan ; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
- b.** Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik (Target kinerja : 10%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.
- c.** Program Kesejahteraan Rakyat pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Kinerja Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual (Kali) (sub kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual (Kali); dan Fasilitas Kelembagaan Bina Spritual (Lembaga)); Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (Dokumen) (sub kegiatan : Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen); Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen); Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)); Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (Dokumen) (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dokumen); Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak,

- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen); Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)).
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Kinerja Persentase Lembaga Adat Aktif (Target kinerja : 60%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Program Pengembangan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan (Target kinerja : 63,64%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan); Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya); Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat; Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat)
 - f. Program Pengembangan Kesenian Tradisional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.
 - g. Program Pembinaan Sejarah dengan indikator Kinerja Cakupan pembinaan sejarah (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi dengan sub kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan

Lembaga Sejarah Lokal Provinsi; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah.

30. Sasaran Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah dengan

Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 12,42% pada pada capaian kinerjanya dan 5,25% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Kinerja Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan; Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa; Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi; Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia; Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan; Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah); Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (sub kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur); Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS; dan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS).
- b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) (Target kinerja : 51,72%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya

dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

- c. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum pada Biro Hukum dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk; Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi ;Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi;Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat; Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun ; Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi; Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan (sub kegiatan : Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan; pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya; Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota); dan Bantuan Hukum dan HAM (sub kegiatan : Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum; dan Fasilitas Penyelesaian Non Litigasi dan HAM).

31.Sasaran Meningkatnya kesadaran politik masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 12,5% pada pada capaian kinerjanya dan 1,06% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik (Target kinerja : 80%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.
- b. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja

Persentase Ormas yang aktif (Target kinerja : 79,66%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

32. Sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dengan

Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan. Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar 12,5% pada pada capaian kinerjanya dan 1,06% pada pada pada capaian keuangannya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Persentase PD yang menerapkan PPRG (Target kinerja : 52,17%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi); dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi)
- b. Program Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (Target kinerja : 75,52%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi); Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota); dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan

- Kewenangan Provinsi; dan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi).
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Keluarga (Target kinerja : 5%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi; dan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi.
 - d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Dokumen Gender (Target kinerja : 1%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi.
 - e. Program Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus; dan Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi; dan Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi); dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 26 sasaran yang ditetapkan dengan 37 indikator kinerja RPJMD Provinsi NTB diketahui bahwa terdapat 7 indikator (18,92 %) yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 30 indikator yang lain (81,08 %) masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 7 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan I 2021 tersebut adalah Nilai Realisasi Investasi, Kontribusi PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan, Inflasi, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

4.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Provinsi NTB Triwulan I Tahun 2021 sesuai dengan tabel berikut.

1. Dalam RKPD Tahun 2021, terdapat beberapa istilah program antara lain program prioritas, program unggulan, dengan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang secara nomenklatur berbeda satu sama lain dan memiliki level pengukuran yang sama dan tidak ada pemetaan yang menunjukkan keterkaitan satu sama lain;
2. Tidak tersedia penjabaran dan target yang akan dicapai pada setiap program prioritas dan program unggulan sehingga kesulitan untuk mengetahui pelaksanaan dan pengukuran capaian pada setiap program prioritas dan program unggulan;
3. Terdapat beberapa indikator baik indikator Program maupun indikator kegiatan dan sub kegiatan mengalami penyesuaian dan perubahan antara yang sudah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 dengan yang tertuang dalam laporan Evaluasi pelaksanaan Renja OPD, hal ini terjadi karena penetapan RKPD Tahun 2021 dilakukan sebelum adanya perubahan Renstra perangkat daerah, sehingga kesulitan untuk mengukur tingkat capaiannya
4. Rendahnya penyampaian laporan evaluasi renja perangkat daerah pada triwulan 1 tahun 2021 oleh perangkat daerah, dari 46 perangkat daerah sebanyak 33 perangkat daerah yang menyampaikan laporan atau 71,74%, sehingga mempengaruhi besaran rata-rata tingkat capaian kinerja pada laporan evaluasi triwulan 1 ini.

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam RKPD Tahun 2021 telah ditetapkan Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Program Unggulan tetapi belum dijabarkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan. Disamping itu juga tidak tersedia target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan;
2. Tidak tersedia pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program perangkat daerah sehingga kesulitan untuk mengetahui pelaksanaan program prioritas dan program unggulan;
3. Terdapat beberapa indikator baik indikator Program maupun indikator kegiatan dan sub kegiatan mengalami penyesuaian dan perubahan antara yang sudah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 dengan yang tertuang dalam laporan Evaluasi pelaksanaan Renja OPD, hal ini terjadi karena penetapan RKPD Tahun 2021 dilakukan sebelum adanya perubahan Renstra perangkat daerah, sehingga kesulitan untuk mengukur tingkat capaiannya
4. Dari 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2021, diketahui bahwa terdapat 7 indikator yang sudah dapat dihitung tingkat capaiannya dan 30 indikator yang lain masih belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Diantara 7 indikator yang telah dapat dihitung tingkat capaiannya pada Triwulan I 2021 tersebut adalah Nilai Realisasi Investasi, Kontribusi PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan, Inflasi, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Meskipun belum ada indikator yang memenuhi target, namun capaian indikator dari sasaran pembangunan NTB tersebut *on the track*.
5. Dari 120 Program pembangunan daerah tersebut, terdapat 93 program yang sudah dapat dihitung realisasi keuangannya dan 17 indikator diantaranya sudah dapat dihitung realisasi kinerjanya dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 7,83% dan realisasi keuangan mencapai 9,09%.
6. Dari 281 Kegiatan, terdapat 155 kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi keuangannya. Adapun sub kegiatan sebanyak 839 sub kegiatan, terdapat 390 Sub Kegiatan yang sudah dapat dihitung realisasi kinerja dan keuangannya dengan rata-rata capai kinerja 5,15% dan dan realisasi keuangan mencapai 9,09%.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Perlu dijabarkan program Prioritas dan Program Unggulan tetapi belum kedalam kegiatan RKPD Tahun 2021;
2. Perlu dilakukan pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk memudahkan dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas dan program unggulan, karena program prioritas dan program unggulan secara nomenklatur berbeda dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
3. Perlu dilakukan penyesuaian indikator dan target baik indikator dan target di Program maupun indikator kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
4. Perlu peningkatan Konsolidasi internal dan koordinasi antar stakeholders agar capaian kinerja dapat terus ditingkatkan;
5. Perlu percepatan pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk mengefektifkan pencapaian kinerja dan anggaran;
6. Perlu mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala, agar monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dapat dikendalikan untuk mengefektifkan pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD PROVINSI NTB
TAHUN 2021
TRIWULAN I

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8/7*100		11=6+9		12=9/5*100		13
Misi NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah																				
Tujuan : Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Point	115,83				123,11												
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana		Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,65				0,61	6.605.666.830					10,713825						
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	40,09	14.445.499.395			25,48	4.159.298.730		402.867.911	-	402.867.911	-	9,69	-	402.867.911	-	2,79	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
		Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	92,5				44,69				-	-	-		-	-	-		
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					3.854.515.942				1.109.832.400,00	-	20.857.170	-	20.857.170			-	20.857.170			
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Destana (Desa Tangguh Bencana) yang terbentuk/ ditingkatkan levelnya	Desa	60	2.161.122.110			20	622.252.800	-	6.600.000	-	6.600.000	-	1,06	-	6.600.000	-	0,31	
		Jumlah SMAB (Sekolah/Madrasah Aman Bencana) yang terbentuk	Sekolah	30				10		-		-	-	-		-	-	-		
	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah dokumen Jitupasna yang disusun	Dok	10	860.276.586			3	247.699.800	-	5.317.170	-	5.317.170	-	2,15	-	5.317.170	-	0,62	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Renkon Penanggulangan Bencana yang disusun	Dok	15	833.117.247			5	239.879.800	-	8.940.000	-	8.940.000	-	3,73	-	8.940.000	-	1,07	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					10.434.516.346				3.004.414.690,00		382.010.741	-	382.010.741		12,71	-	382.010.741		3,66	
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Kejadian Bencana yang Tertangani	Kejadian	3	258.841.006			3	74.528.200	-	34.062.206	-	34.062.206	-	45,70	-	34.062.206	-	13,16	
	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Tertolong dan Terevakuasi	Orang	3000	4.073.942.912			1000	1.173.012.100	1.000	309.874.402	1.000	309.874.402	100,00	26,42	1.000,00	309.874.402	33,33	7,61	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Jenis Logistik yang Tersedia dan Didistribusikan	Jenis	25	6.101.732.428			25	1.756.874.390	-	38.074.133	-	38.074.133	-	2,17	-	38.074.133	-	0,62	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					156.467.107				45.051.640		-	-	-		-	-	-		-	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan yang dikelola	Aplikasi	1	156.467.107			1	45.051.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	7.543.347.993			100	2.446.368.100		287.245.000	-	287.245.000	-	11,74	-	287.245.000	-	3,81	Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		Jumlah korban bencana alam sosial urusan provinsi yang tertangani	Jiwa	73775	7.543.347.993			23550	2.446.368.100		287.245.000	-	287.245.000	-	11,74	-	287.245.000	-	3,81	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah korban bencana alam yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan	Jiwa	47500	1.923.788.498			15000	623.900.000		192.445.000	-	192.445.000	-	30,85	-	192.445.000	-	10,00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Sandang	jumlah korban bencana yang diberikan sandang	KK	11875	1.076.137.499			3750	349.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	jumlah korban bencana alam	Jiwa	9000	878.794.233			3000	285.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kjumlah kelompok rentan yang tertangani	Jiwa	2700	1.985.390.740			900	643.878.100		9.000.000	-	9.000.000	-	1,40	-	9.000.000	-	0,45	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah LDP (Layanan Dukungan Psikososial) yang dtingkatkan	Jiwa	2700	1.679.237.022			900	544.595.000		85.800.000	-	85.800.000	-	15,75	-	85.800.000	-	5,11	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					21.988.847.388				6.605.666.830				690.112.911	5,88	10,30		690.112.911	1,96	3,12	
Tujuan : Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan								78,56												
Sasaran : Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar								83,95												
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	86,6	922.596.058.991			83,95	249.463.037.482		66.931.453.189	-	66.931.453.189	-	26,83	-	66.931.453.189	-	7,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyelenggaraan Jalan Provinsi		Panjang jalan provinsi yg dibangun	Km	90,31	922.596.058.991			89,07	249.463.037.482		66.931.453.189	-	66.931.453.189	-	26,83	-	66.931.453.189	-	7,25	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				3.022.510.939				855.552.300		172.287.300	-	172.287.300		20,14	-	172.287.300		5,70	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan				4.144.694.553				1.139.986.200		198.436.200	-	198.436.200		17,41	-	198.436.200		4,79	
	Pembangunan Jalan				836.600.536.203				195.018.425.900		55.116.936.689	-	55.116.936.689		28,26	-	55.116.936.689		6,59	
	Rehabilitasi Jalan				40.884.402.060				35.353.227.000		6.970.131.400	-	6.970.131.400			-	6.970.131.400		17,05	
	Pemeliharaan Berkala Jalan				16.630.407.060				11.099.232.000		2.215.827.400	-	2.215.827.400			-	2.215.827.400		13,32	
	Pemeliharaan Rutin Jalan				23.390.918.476				5.557.452.882		2.247.334.200	-	2.247.334.200			-	2.247.334.200			
	Rehabilitasi Jembatan				1.345.224.166				370.000.000		-	-	-		-	-	-		-	
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				277.809.619				69.161.200		10.500.000	-	10.500.000		15,18	-	10.500.000		3,78	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					922.596.058.991				249.463.037.482		66.931.453.189		66.931.453.189	-	19,24		66.931.453.189	-	7,30	
Sasaran : Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar								50,04												
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	76,28	345.464.448.089			74,55	170.863.271.539		72.220.226.400	-	72.220.226.400	-	42,27	-	72.220.226.400	-	20,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Buah	70	155.020.779.476			30	83.121.261.994,00		27.636.339.600	-	27.636.339.600	-	33,25	-	27.636.339.600	-	17,83	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				112.778.696											-				
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi				154.298.629				80.010.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku				5.080.552.994				5.080.552.994,00		-	-	-			-	-			
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				11.837.069.230				7.710.707.800,00		2.177.328.000	-	2.177.328.000		28,24	-	2.177.328.000		18,39	
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya				17.952.306.764				11.502.743.200,00		2.821.146.000	-	2.821.146.000		24,53	-	2.821.146.000		15,71	
	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				880.526.046				469.004.700,00		96.000.000	-	96.000.000		20,47	-	96.000.000		10,90	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi				2.464.106.133				1.413.868.000,00		30.000.000	-	30.000.000		2,12	-	30.000.000		1,22	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Ha - Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DI	65	201.126.393.614			25	98.424.734.545		8.473.773.600	-	8.473.773.600	-	8,61	-	8.473.773.600	-	4,21	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa				1.253.062.619				764.076.900,00		66.000.000	-	66.000.000		8,64	-	66.000.000		5,27	
	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah				3.788.844.881							-	-		#DIV/0!	-	-	-	-	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				78.309.505.406				44.960.430.300,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				76.221.808.605				40599723245		1.069.134.000	-	1.069.134.000			-	1.069.134.000			
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				1.729.381.617				1.066.881.400,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				111.898.932.587				55.088.204.800		22.511.865.600	-	22.511.865.600			-	22.511.865.600			
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				4.640.208.396				1.776.170.500		-	-	-			-	-			
	Rehabilitasi Bendung Irigasi				21.230.485.727				10.214.989.000		7.338.639.600					-				
	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi				17.492.940.962				290.830.000		-					-				
	Operasional Unit Pengelola Irigasi				1.100.363.797				527.803.700		-					-				
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					345.464.448.089				170.863.271.539		72.220.226.400		72.220.226.400	-	42		72.220.226.400	-	20,91	
Sasaran : Meningkatnya konektivitas antar wilayah		Persentase konektivitas transportasi publik	%	89,14				81,71												
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	81,63	13.330.628.899			50,83	3.007.376.800		205.360.250	-	205.360.250	-	6,83	-	205.360.250,00		1,54	Dinas Perhubungan
		Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	100				94,37				-	-	-		-	-	-		
		Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	40				30				-	-	-		-	-	-		
		Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	52,58				46,2				-	-	-		-	-			
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah Fasilitas yang terpasang	Jenis	3	1.147.935.839			1	345.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Fasilitas yang terpasang	Jenis	2	1.147.935.839			1	345.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jenis	1				0				-	-			-	-	-	#DIV/0!	
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah Dokumen perencanaan dan hasil Sosialisasi pengembangan terminal	Dokumen	18	2.789.208.621			4	808.978.000,00		141.380.250	-	141.380.250	-	17,48	-	141.380.250	-	5,07	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Fasilitas Terminal	Dokumen	2	221.081.845			0	21.600.000,00		2.080.250	-	2.080.250		9,63	-	2.080.250	-	0,94	
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung terminal yang dibangun	Paket	1								-	-			-	-	-	#DIV/0!	

[illegible]

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Unit Kendaraan	881	310.560.026			811	77.825.000,00	13	-	13	-	1,60	-	13,00	-	1,48	-	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Unit Kendaraan	881	310.560.026			811	77.825.000,00	13	-	13	-	1,60	-	13,00	-	1,48	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi izin penyelenggaraan angkutan taksi	Dokumen	1				0				-	-			-	-	-		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	66,06	1.729.526.622			59,39	563.820.000		24.960.000	-	24.960.000	-	4,43	-	24.960.000	-	1,44	Dinas Perhubungan
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Fasilitas Perizinan Angkutan Laut	Dokumen	40	205.663.519			35	61.810.000,00	12	-	12	-	34,29	-	12,00	-	30,00	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitas Perizinan Angkutan Laut	Dokumen	40	205.663.519			35	61.810.000,00	12	-	12	-	34,29	-	12,00	-	30,00	-	
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	Unit	25	369.735.040			21	30.682.000,00	3	1.000.000	3	1.000.000	14,29	3,26	3,00	1.000.000	12,00	0,27	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	Unit	25	369.735.040			21	30.682.000,00	3	1.000.000	3	1.000.000	14,29	3,26	3,00	1.000.000	12,00	0,27	
Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit	22	596.584.926			22	175.800.000,00	0	23.320.000	-	23.320.000	-	13,27	-	23.320.000	-	3,91	
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit	22	596.584.926			22	175.800.000,00	0	23.320.000	-	23.320.000	-	13,27	-	23.320.000	-	3,91	
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokumen	122	108.483.878			110	27.008.000,00	56	-	56	-	50,91	-	56,00	-	45,90	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokumen	122	108.483.878			110	27.008.000,00	56	-	56	-	50,91	-	56,00	-	45,90	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Study Tarif Penyebrangan	Dokumen	1				0				-	-			-	-	-	#DIV/0!	
	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Study Tarif Penyebrangan	Dokumen	1				0				-	-			-	-	-	#DIV/0!	
Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Dokumen RIP Pelabuhan Regional	Dokumen	1				0				-	-			-	-	-	#DIV/0!	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen RIP Pelabuhan Regional	Dokumen	1				0				-	-			-	-	-	#DIV/0!	
Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah pelabuhan yang diawasi	Pelabuhan	4	449.059.258			1	122.020.000,00	0	640.000	-	640.000	-	0,52	-	640.000	-	0,14	
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen DED dan Amdal Pelabuhan Regional yang direncanakan	Dokumen	1				0				-	-			-	-	-	#DIV/0!	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah pelabuhan yg diperihara	Paket	3				0				-	-			-	-	-	#DIV/0!	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah data pelabuhan	Dokumen	3	449.059.258			1	122.020.000,00	0	640.000	-	640.000	-	0,52	-	640.000	-	0,14	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					15.060.155.521				3.571.196.800		230.320.250		230.320.250	10,81	4,32		230.320.250	5,56	#DIV/0!	
Misi NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi																				
Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB				B												
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Opini BPK	Status	WTP				WTP		WTP		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	2.280.262.468.462			100	714.105.821.724		57.180.056.740	-	57.180.056.740	-	8,01	-	57.180.056.740	-	2,51	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100				100				-	-	-		-	-	-		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	Dokumen	3	7.120.144.147			1	2.256.750.000	-	333.296.800	-	333.296.800	-	14,77	-	333.296.800	-	4,68	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Tersusun	Dokumen	3	285.775.970			1	89.286.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Tersusun	Dokumen	3	299.041.511			1	93.430.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang di Verifikasi	Dokumen	408	308.159.930			136	96.279.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang di Verifikasi	Dokumen	408	335.178.476			136	104.721.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun dan diverifikasi	Dokumen	804	179.076.204			268	50.895.800	-	12.600.000	-	12.600.000	-	24,76	-	12.600.000	-	7,04	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan nealisasi Angganaan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun dan diverifikasi	Dokumen	408	102.312.957			136	31.966.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub tentang Penjabaran APBD	Dokumen	6	3.047.082.447			2	989.242.500	1	214.080.500	1	214.080.500	50,00	21,64	1,00	214.080.500	16,67	7,03	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub tentang Perubahan Penjabaran APBD	Dokumen	6	955.711.392			2	298.596.300	-	12.154.300	-	12.154.300	-	4,07	-	12.154.300	-	1,27	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi Bidang Anggaran yang Tersusun		3	286.531.331			1	89.522.000	-	14.419.000	-	14.419.000	-	16,11	-	14.419.000	-	5,03	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Rapat Terselenggara		5	106.101.823			2	40.713.000	-	12.862.500	-	12.862.500	-	31,59	-	12.862.500	-	12,12	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Rapat Terselenggara		6	249.769.729			2	84.453.500	-	31.220.500	-	31.220.500	-	36,97	-	31.220.500	-	12,50	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Rapat Terselenggara		6	88.877.876			2	39.228.100	-	6.200.000	-	6.200.000	-	15,80	-	6.200.000	-	6,98	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	kegiatan	10	876.524.501			2	248.415.700	1	29.760.000	1	29.760.000	50,00	11,98	1,00	29.760.000	10,00	3,40	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					3.360.714.656				1050000000		142.436.000	-	142.436.000		13,57	-	142.436.000			
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				358.536.403				112018800		47.858.000	-	47.858.000		42,72	-	47.858.000			
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				611.520.760				191059600		-	-	-			-	-			
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				617.880.512				193046600		-	-	-			-	-			
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota				189.379.472				59168500		39.308.500	-	39.308.500			-	39.308.500			
	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah				596.752.499				186445500		-	-	-			-	-			
	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				100.735.982				31473300		-	-	-			-	-			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				885.909.029				276787700		55.269.500	-	55.269.500			-	55.269.500			
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					3.079.907.343				1071486100		109.920.000	-	109.920.000		10,26	-	109.920.000			
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				834.573.471				773879800		79.380.000	-	79.380.000		10,26	-	79.380.000			
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				412.901.470				556200		-	-	-			-	-			
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				75.527.929				27579500		-	-	-			-	-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				220.807.961				187371700		19.020.000	-	19.020.000		10,15	-	19.020.000			
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1.860.720.491				12000000		-	-	-			-	-			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				274.643.874				41798000		11.520.000	-	11.520.000		27,56	-	11.520.000			
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				319.860.667				15193600		-	-	-			-	-			
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPD dengan Instansi Terkait				118.120.895				4387300		-	-	-			-	-			
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				435.169.650				774000		-	-	-			-	-			
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				443.156.342				7946000		-	-	-			-	-			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					921.154.543				870057600		35.058.400	-	35.058.400		4,03	-	35.058.400			
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				187.705.510				105806300		-	-	-			-	-			
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				191.228.606				138442200		11.520.000	-	11.520.000		8,32	-	11.520.000			
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				137.404.786				61661100		-	-	-			-	-			
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				283.743.218				217401500		23.538.400	-	23.538.400		10,83	-	23.538.400			
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				1.554.757.327.482				197761700		-	-	-			-	-			
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				811.254.923				23218700		-	-	-			-	-			
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				22.044.021.647				37215400		-	-	-			-	-			
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1.531.788.709.711				23986400		-	-	-			-	-			
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				600.248.720				34418300		-	-	-			-	-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan ke Kabupaten/Kota	Dokumen	30	22.623.608			5	5.137.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	90	3.807.331.659			80	1.078.974.400	-	291.989.790	-	291.989.790	-	27,06	-	291.989.790	-	7,67	INSPEKTORAT
		Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	48,89				40	2.119.203.000	∞		∞	-			∞	-			INSPEKTORAT
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jlh Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	Dokumen	209	7.738.889.634			72	2.120.781.000	-	206.160.000	-	206.160.000	-	9,72	-	206.160.000	-	2,66	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dok. LHA, LHE dan Monev	Dokumen	98	3.577.855.286			36	1.118.988.500	-	99.620.000	-	99.620.000	-	8,90	-	99.620.000	-	2,78	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Review	Dokumen	51	1.450.949.876			16	425.159.500	1	29.600.000	1	29.600.000	6,25	6,96	1,00	29.600.000	1,96	2,04	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen LHA	Dokumen	3	514.341.109			1	150.713.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Laporan Monev	Dokumen	57	2.195.743.363			19	425.920.000	-	76.940.000	-	76.940.000	-	18,06	-	76.940.000	-	3,50	
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	75	3.685.314.639			25	1.077.396.400	-	85.829.790	-	85.829.790	-	7,97	-	85.829.790	-	2,33	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monev TPTGR	Dokumen	12	2.237.154.660			4	653.054.400	-	46.280.000	-	46.280.000	-	7,09	-	46.280.000	-	2,07	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen LHA	Dokumen	63	1.448.159.979			21	424.342.000	-	31.299.790	-	31.299.790	-	7,38	-	31.299.790	-	2,16	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	7,55	1.402.134.356			5,55	397.356.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jlh Dok Laporan dan Dok Regulasi	laporan	48	1.372.846.178			16	397.356.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jlh Dok Regulasi Kebijakan Pengawasan	Dokumen	9	151.867.486			3	30.133.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jlh Dok Laporan Kegiatan	laporan	39	1.220.978.692			13	367.223.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	97	5.137.300.617			95	1.570.509.500	95	1.570.509.500	95	1.570.509.500	100,00	100,00	95,00	1.570.509.500	97,94		INSPEKTORAT
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Dok. Lap. Hasil Pendampingan dan Asistensi	Dokumen	33	5.137.300.617			11	1.570.509.500	11	1.570.509.500	11	1.570.509.500	100,00	100,00	11,00	1.570.509.500	33,33	30,57	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jlh Dok Lap Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi	Dokumen	33	5.137.300.617			11	1.570.509.500	11	1.570.509.500	11	1.570.509.500	100,00	100,00	11,00	1.570.509.500	33,33	30,57	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					2.292.504.068.528				718.929.690.424		59.306.193.030		59.306.193.030	11,57	16,01		59.306.193.030	4,38	5,88	
Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38,65				35,41												
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Derajat Desentralisasi Fiskal	%	38,44	1.667.730.000			35,2	527.520.000		12.700.000	-	12.700.000	-	2,41	-	12.700.000	-	0,76	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Daerah	%	4,05	488.825.248				154.620.800,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	umlah Dokumen Target Pendapatan Daerah	Dokumen	2	488.825.248				154.620.800,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.178.903.064				372.900.000,00		12.700.000	-	12.700.000		3,41	-	12.700.000		1,08	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah hasil asistensi	dokumen	9	7.074.746.916			2	66.945.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah hasil movev	dokumen	6	420.808.562			2	194.928.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	dokumen	6	122.349.575			1	57.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi	dokumen	6	306.927.188			4	2.395.000.000	1,00	76.017.000	1	76.017.000	25,00	3,17	1,00	76.017.000	16,67	24,77	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah hasil asistensi	dokumen	3	142.191.000			4	82.740.800	1,00	9.556.700	1	9.556.700	25,00	11,55	1,00	9.556.700	33,33	6,72	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah hasil movev	dokumen	12	4.152.378.164			4	796.127.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	dokumen	12	373.484.232			2	114.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen	12	848.520.274			3	6.596.216.960	1,00	679.856.600	1	679.856.600	33,33	10,31	1,00	679.856.600	8,33	80,12	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi	dokumen	6	708.087.921			5	2.164.849.950	1,00	23.130.000	1	23.130.000	20,00	1,07	1,00	23.130.000	16,67	3,27	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah hasil asistensi	dokumen	9	19.507.304.818			4	728.631.520	-	600.000	-	600.000	-	0,08	-	600.000	-	0,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah hasil movev	dokumen	12	1.316.145.426			4	954.038.490	1,00	19.750.000	1	19.750.000	25,00	2,07	1,00	19.750.000	8,33	1,50	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	dokumen	12	714.365.009			3	171.000.000	1,00	61.053.000	1	61.053.000	33,33	35,70	1,00	61.053.000	8,33	8,55	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi	dokumen	12	1.122.864.514			2	2.226.697.000	-	47.463.600	-	47.463.600	-	2,13	-	47.463.600	-	4,23	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah hasil asistensi	dokumen	9	3.261.740.437			2	23.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah hasil movev	dokumen	6	1.493.870.050			2	290.000.000	-	91.130.000	-	91.130.000	-	31,42	-	91.130.000	-	6,10	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	dokumen	6	426.478.831			2	38.000.000	-	436.730.000	-	436.730.000	-	1.149,29	-	436.730.000	-	102,40	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen	6	3.411.830.649			3	3.733.333.700	1,00	611.656.000	1	611.656.000	33,33	16,38	1,00	611.656.000	16,67	17,93	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi	dokumen	6	7.760.009.902			2	237.234.500	1,00	580.232.300	1	580.232.300	50,00	244,58	1,00	580.232.300	16,67	7,48	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah hasil asistensi	dokumen	9	11.251.032.427			2	141.417.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah hasil monev	dokumen	6	5.358.514.924			2	85.788.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	dokumen	6	663.708.718			1	2.415.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi	dokumen	6	880.827.024			2	480.650.000	-	24.363.700	-	24.363.700	-	5,07	-	24.363.700	-	2,77	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah hasil asistensi	dokumen	3	725.531.258			4	141.417.900	-	1.450.000	-	1.450.000	-	1,03	-	1.450.000	-	0,20	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah hasil monev	dokumen	6	1.398.271.579			4	193.825.000	-	5.610.000	-	5.610.000	-	2,89	-	5.610.000	-	0,40	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	dokumen	12	698.367.957			2	38.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN		Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya	%	100	2.916.865.961			84,44	826.621.500	0	77.462.431	-	77.462.431	-	9,37	-	77.462.431	-	2,66	INSPEKTORAT
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	Dokumen	280	2.923.408.414			97	826.621.500	-	77.462.431	-	77.462.431	-	9,37	-	77.462.431	-	2,65	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jlh Dok Laporan Hasil Evaluasi	Dokumen	186	506.495.268			62	148.414.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Reviu Laporan Kinerja	Jlh Dok Laporan Hasil Review	Dokumen	24	952.099.099			8	248.985.500	1	-	1	-	12,50	-	1,00	-	4,17	-	
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jlh Dok Lap dan Hasil Evaluasi	Dokumen	70	1.464.814.047			27	429.222.000	-	77.462.431	-	77.462.431	-	18,05	-	77.462.431	-	5,29	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	26,66	2.529.078.823			17,77	716.725.400	-	1.500.000	-	1.500.000	-	0,21	-	1.500.000	-	0,06	INSPEKTORAT
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	Dokumen	328	2.065.293.547			85	716.725.400	-	1.500.000	-	1.500.000	-	0,21	-	1.500.000	-	0,07	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jlh Dok Laporan Pembinaan Pendampingan dan Asistensi PD	dokumen	318	1.121.493.498			82	428.621.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jlh Dok Laporan Hasil Monev PMRPB	dokumen	4	277.495.002			1	92.862.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jlh Dok Laporan Kegiatan	dokumen	6	666.305.047			2	195.241.700	-	1.500.000	-	1.500.000	-	0,77	-	1.500.000	-	0,23	
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%		3.842.393.557			BB	1.147.912.100	BB	65.154.000	BB	65.154.000	100,00	5,68	BB	65.154.000	-	1,70	Biro Organisasi

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase kelembagaan perangkat daerah dan dokumen analisis jabatan yang sesuai ketentuan	%	100	498.328.606			1	405.050.400	-	31.524.000	-	31.524.000	-	7,78	-	31.524.000	-	6,33	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen perangkat daerah yang difasilitasi sesuai peraturan perundang-undangan, Jumlah dokumen UPTD/UPTB Cabang Dinas dan Instansi Vertikal yang terfasilitasi	dokumen	6	215.079.792			6	174.820.700		8.300.000	-	8.300.000		4,75	-	8.300.000	-	3,86	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perangkat daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	dokumen	22	103.733.324			22	84.316.300		9.800.000	-	9.800.000		11,62	-	9.800.000	-	9,45	
	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja yang tersusun, jumlah sosialisasi peraturan penataan anjab abk, jumlah dokumen data jabatan struktural lingkup provinsi, jumlah dokumen hasil validasi Anjab, ABK dan Evjab Kab/Kota	dokumen	47	179.515.490			47	145.913.400		13.424.000	-	13.424.000	-	9,20	-	13.424.000		7,48	
Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang baik	%	100	913.933.761			100	742.861.700	5,90%	33.630.000	0	33.630.000	0,06	4,53	0,06	33.630.000	0,06	3,68	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kabupaten / Kota yang nilai PMPRB baik, Nilai PMPRB Provinsi	Nilai	A	236.215.400			B	192.000.100	B	9.010.000	B	9.010.000	100,00	4,69	B	9.010.000		3,81	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen hasil penilaian kinerja perangkat daerah dan jumlah laporan SAKIP Perangkat Daerah yang baik	Dokumen	35	225.755.369			35	183.498.000		4.900.000	-	4.900.000	-	2,67	-	4.900.000	-	2,17	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Budaya Kerja	PD	35	98.332.852			35	79.926.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki SOP tata kelola Pemerintahan	PD	35	89.390.873			35	72.658.500		4.340.000	-	4.340.000	-	5,97	-	4.340.000	-	4,86	
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi pelayanan publik yang termanfaatkan	Inovasi, PD	20	264.239.267			20	214.778.400		15.380.000	-	15.380.000	-	7,16	-	15.380.000	-	5,82	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	9.485.045.504			100	2.833.650.000		364.044.756	-	364.044.756	-	12,85	-	364.044.756	-	3,84	Biro Pemerintahan
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan					2.778.249.879				830.000.000,00		63.727.800	-	63.727.800		7,68	-	63.727.800		2,29	
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				794.553.356				237.372.200,00		26.887.800	-	26.887.800		11,33	-	26.887.800		3,38	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstra s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				720.804.546				215.339.800,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Fasilitasi Penataan Wilayah				1.262.891.976				377.288.000,00		36.840.000	-	36.840.000		9,76	-	36.840.000		2,92	
Pelaksanaan Otonomi Daerah					4.928.620.306				1.472.421.500,00		263.497.741	-	263.497.741		17,90	-	263.497.741		5,35	
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				1.933.939.071				577.762.800,00		101.164.600	-	101.164.600		17,51	-	101.164.600		5,23	
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				652.721.357				195.000.000,00		3.800.000	-	3.800.000		1,95	-	3.800.000		0,58	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				2.341.959.878				699.658.700,00		158.533.141	-	158.533.141		22,66	-	158.533.141		6,77	
Facilitasi Kerjasama Daerah					1.778.175.320				531.228.500,00		36.819.215	-	36.819.215		6,93	-	36.819.215		2,07	
	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah				763.762.649				228.173.500,00		23.379.400	-	23.379.400		10,25	-	23.379.400		3,06	
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta				473.361.562				141.416.400,00		9.181.400	-	9.181.400		6,49	-	9.181.400		1,94	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				541.051.109				161.638.600,00		4.258.415	-	4.258.415		2,63	-	4.258.415		0,79	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					71.050.807.891				20.847.306.100		2.117.784.687	-	2.117.784.687		14,28	23,48	2.117.784.687		9,77	5,08
Sasaran : Meningkatnya Profesionalisme ASN		Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,72				0,68												
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	19	21.515.000.000			16	6.500.000.000		266.535.585	-	266.535.585	-	4,10	-	266.535.585	-	1,24	Badan Kepegawaian Daerah
		Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan	Nilai	80				80				-	-	-		-	-	-		
		Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi	Nilai	135				88				-	-	-		-	-	-		
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	Nilai	136				132				-	-	-		-	-	-		
		Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	19				16				-	-	-		-	-	-		
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah informasi pegawai yang dikelola		4170	3.699.062.520			1390	853.673.400	741,0952137	36.206.878	741	36.206.878	53,32	4,24	741,10	36.206.878	17,77	0,98	
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah usulan Formasi CPNS/PPPK		4500	15.282.886			1500	3.527.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi CPNS/PPPK		1200	112.747.576			400	26.020.000	109	7.106.844	109	7.106.844	27,25	27,31	109,00	7.106.844	9,08	6,30	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS/P3K terseleksi		1200	1.904.365.497			400	439.491.400	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Seleksi CPNS/PPPK		30	136.493.030			10	31.500.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah koordinasi perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN		3	20.365.626			1	4.700.000	0	1.000.000	-	1.000.000	-	21,28	-	1.000.000	-	4,91	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT		735	264.809.478			245	61.113.000	41	12.485.034	41	12.485.034	16,73	20,43	41,00	12.485.034	5,58	4,71	
	Evaluasi Pemberhentian ASN	jumlah dokumen analisis zero growth kebutuhan ASN		3	105.727.934			1	24.400.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan Fasilitasi KORPRI		0	-					0		-	-			-	-			
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi ASN		3	18.849.036			1	4.350.000	1	2.615.000	1	2.615.000	100,00	60,11	1,00	2.615.000	33,33	13,87	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/SIMADU		42429	777.966.944			14143	179.540.000	560	13.000.000	560	13.000.000	3,96	7,24	560,00	13.000.000	1,32	1,67	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Tata Naskah yang diakuisisi		41850	231.093.533			13950	53.332.000	3.348	-	3.348	-	24,00	-	3.348,00	-	8,00	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang telah terdokumentasi secara Elektronik		41850	111.360.980			13950	25.700.000	3.348	-	3.348	-	24,00	-	3.348,00	-	8,00	-	
Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah SK mutasi, kenaikan pangkat dan promosi		10680	3.492.141.693			3560	805.920.000		163.957.682	-	163.957.682	-	20,34	-	163.957.682	-	4,70	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT		690	365.757.991			230	84.410.000		4.258.000	-	4.258.000	-	5,04	-	4.258.000	-	1,16	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah keputusan kenaikan pangkat / gaji berkala		9000	1.037.953.669			3000	239.540.000		6.230.000	-	6.230.000	-	2,60	-	6.230.000	-	0,60	
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam Jab. Struktural		1200	2.088.430.033			400	481.970.000		153.469.682	-	153.469.682	-	31,84	-	153.469.682	-	7,35	
Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah Pegawai yang terpetakan Kompetensinya		1200	1.415.601.711			400	326.694.000		39.468.400	-	39.468.400	-	12,08	-	39.468.400	-	2,79	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang diberikan Konseling		90	157.725.279			30	36.400.000		3.600.000	-	3.600.000	-	9,89	-	3.600.000	-	2,28	
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang telah Terpetakan Kompetensinya		1200	166.131.516			400	38.340.000		26.366.400	-	26.366.400	-	68,77	-	26.366.400	-	15,87	
	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah SPT, Surat Rekomendasi, Surat Ijin Mengikuti Diklat dan Sertifikasi		300	16.465.825			100	3.800.000		255.000	-	255.000	-	6,71	-	255.000	-	1,55	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal		240	111.581.969			80	25.751.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat		30	269.562.902			10	62.210.000		732.000	-	732.000	-	1,18	-	732.000	-	0,27	
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Kerjasama Pemetaan Kompetensi ASN		0	-						2.850.000	-	2.850.000			-	2.850.000			
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Hasil Pemetaan Talenta		900	144.465.956			300	33.340.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Jafung dan Uji Kompetensi		60	92.884.590			20	21.436.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah kegiatan sosialisasi jabatan fungsional		3	47.781.226			1	11.027.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan / pemberhentian dalam Jab. Fungsional		1320	200.189.778			440	46.200.000		2.005.000	-	2.005.000	-	4,34	-	2.005.000	-	1,00	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen penilaian DUPAK/PAK		120	121.717.118			40	28.090.000		3.660.000	-	3.660.000	-	13,03	-	3.660.000	-	3,01	
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengembangan karir jabatan Fungsional		6	87.095.552			2	20.100.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai		38679	1.356.602.059			12893	313.078.000		26.902.625	-	26.902.625	-	8,59	-	26.902.625	-	1,98	
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kebijakan tentang Evaluai Kinerja Aparatur		9	42.616.157			3	9.835.000		300.000	-	300.000	-	3,05	-	300.000	-	0,70	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang Berkinerja Baik		38679	420.896.842			12893	97.135.000		10.840.000	-	10.840.000	-	11,16	-	10.840.000	-	2,58	
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Aparatur		36	166.530.163			12	38.432.000		330.000	-	330.000	-	0,86	-	330.000	-	0,20	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Penghargaan Pegawai teladan		72	97.070.376			24	22.402.000		12.057.625	-	12.057.625	-	53,82	-	12.057.625	-	12,42	
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Satya Lencana Karya Satya		600	160.593.800			200	37.062.000		750.000	-	750.000	-	2,02	-	750.000	-	0,47	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah dokumen Laporan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur		3	72.076.986			1	16.634.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan disiplin ASN		138	243.672.558			46	56.235.000		375.000	-	375.000	-	0,67	-	375.000	-	0,15	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin		90	51.161.053			30	11.807.000		750.000	-	750.000	-	6,35	-	750.000	-	1,47	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pemberian Izin Kawin Cerai PNS		60	14.160.609			20	3.268.000		750.000	-	750.000	-	22,95	-	750.000	-	5,30	
	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Disiplin ASN		36	87.823.515			12	20.268.000		750.000	-	750.000	-	3,70	-	750.000	-	0,85	
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0,103157895	51.655.240.040			0,086633663	16.446.056.300	0,02	209.759.700	0	209759700	22,86	1,28	0,02	209.759.700	19,20	0,41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0,037425743	-			0,033415842		0,00		-		-		-	-	-		
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0,145544554	-			0,129950495		0,02		0		14,29		0,02	-	12,76		
		Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0,622710623				0,549450549		0,00		-		-		-	-	-		
Pengembangan Kompetensi Tekhnis		Jumlah Kompetensi Tekhnis ASN	org	630	3.017.260.627			210	960.639.000	30	29.970.550	30	29.970.550	14,29	3,12	30,00	29.970.550	4,76	0,99	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Diklat Teknis	dok	3	248.451.557			1	79.102.300	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Standar Pembelajaran Diklat Teknis	Dok	3	188.076.443			1	59.880.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Pelayanan Dasar dan Pilihan	org	180	2.178.461.048			60	693.581.000	0	29.970.550	-	29.970.550	-	4,32	-	29.970.550	-	1,38	
		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Non Pelayanan Dasar	org	90				30		30		30	-	100,00		30,00	-	33,33		
		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Penunjang	org	180				60		0		-	-	-		-	-	-		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	org	90				30		0		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi	org	90				30		0		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Evaluasi Pasca Diklat Tekhnis	Dok	1	402.271.578			1	128.075.700	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					48.637.979.414				12.822.375.700		179.789.150	-	179.789.150			-	179.789.150			
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional				132.057.743				42.044.700		267.400	-	267.400			-	267.400			
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				392.098.238				124.836.700		1.781.000	-	1.781.000			-	1.781.000			
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				671.037.778				143.638.800		600.000	-	600.000			-	600.000			
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				1.542.322.945				491.046.600		22.903.600	-	22.903.600			-	22.903.600			
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga				164.865.900				46.619.000		2.660.400	-	2.660.400			-	2.660.400			
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				188.076.443				58.249.400		-	-	-			-	-			
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				45.427.613.780				11.877.764.500		151.576.750	-	151.576.750			-	151.576.750			
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				119.906.585				38.176.000		-	-	-			-	-			
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					73.170.240.040				22.946.056.300		476.295.285		476.295.285	7,03	9,62		476.295.285	2,69	2,24	
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	Point	4,55				4,23			179.789.150									
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%	98,90	880.122.401			98,70	243.082.000	-	-	-	-			-	-		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan					598.914.963				165.415.000	-	-	-	-			-	-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan nealisasi Angganan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional				490.294.530				135.415.000	-	-	-	-			-	-				
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				108.620.433				30.000.000	-	-	-	-			-	-				
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan					281.207.438				77.667.000	-	-	-	-			-	-				
	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk				208.793.817				57.667.000	-	-	-	-			-	-				
	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk				72.413.622				20.000.000	-	-	-	-			-	-				
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	654.257.000			100	180.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Pelayanan Pencatatan Sipil					654.255.625				180.699.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil				654.255.625				180.699.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%	100	3.155.081.000			100	871.406.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					692.574.742				191.283.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				31.922.459				8.816.700,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				430.597.827				118.927.300,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				189.443.449				52.322.600,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi				40.611.007				11.216.400,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					2.462.507.039				680.122.600,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				496.033.310				137.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1.966.473.729				543.122.600,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingk ar hutan dan pesisir	%	25	266.644.000			15	47.500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi					171.982.352				47.500.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				171.982.352				47.500.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	80	16.947.033.421			60	4.644.327.700			1.201.025.434	-	1.201.025.434	-	25,86	-	1.201.025.434	-	7,09	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik (%)	%	85	16.947.033.421			75	4.644.327.700		1.201.025.434	-	1.201.025.434	-	25,86	-	1.201.025.434	-	7,09	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Opini dan Aspirasi	Dokumen	5	912.845.710			1	250.165.000	0	17.640.012	-	17.640.012	-	7,05	-	17.640.012	-	1,93	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi yang diproduksi dan disebar melalui media Publik	Informasi	2117	4.013.523.491			610	1.099.904.500	158	247.200.000	158	247.200.000	25,90	22,47	158,00	247.200.000	7,46	6,16	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Perangkat Daerah	Informasi	2070	290.091.285			300	79.499.400	50		50	-	16,67	-	50,00	-	2,42	-	
	Layanan Hubungan Manusia	Jumlah Lembaga dan Pers yang Terlibat dalam Penyebarluasan Informasi	Lembaga	5	91.223.633			5	24.999.800	5		5	-	100,00	-	5,00	-	100,00	-	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Aparatur yang Terlatih dan terfasilitasi	Orang	1440	277.404.895			30	76.022.700	0		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Sengketa Informasi yang terselesaikan	Kasus	2	3.921.905.768			6	1.074.796.700	0	221.239.622	-	221.239.622	-	20,58	-	221.239.622	-	5,64	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok / Komunitas yang diberdayakan dalam Penyebarluasan Informasi	Komunitas	954	6.345.476.189			15	1.738.975.200	15	687.970.800	15	687.970.800	100,00	39,56	15,00	687.970.800	1,57	10,84	
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Unit	30	1.094.562.451			10	299.964.400	1	26.975.000	1	26.975.000	10,00	8,99	1,00	26.975.000	3,33	2,46	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	65	6.229.379.686			45	1.707.159.000		121.310.000	-	121.310.000	-	7,11	-	121.310.000	-	1,95	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Kualifikasi/Level Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (Kualifikasi/Level)	%	Terintegrasi	6.229.379.686			Terstandarisasi	1.707.159.000	0	121.310.000	-	121.310.000		7,11	-	121.310.000		1,95	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan e-government	Dokumen	6	1.604.833.588			2	439.804.000	0	98.660.000	-	98.660.000	-	22,43	-	98.660.000	-	6,15	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pusat Data	OPD	46	2.997.632.565			40	821.500.000	40	14.000.000	40	14.000.000	100,00	1,70	40,00	14.000.000	86,96	0,47	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Simpul Jaringan Perangkat Daerah yang Terkoneksi	OPD	30	1.364.351.572			18	373.900.000	5	8.650.000	5	8.650.000	27,78	2,31	5,00	8.650.000	16,67	0,63	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Aplikasi	9	262.561.961			1	71.955.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	30	1.530.744.809			20	419.500.000		89.362.000	-	89.362.000	-	21,30	-	89.362.000	-	5,84	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Persentase Data yang Tervalidasi	%	65	1.530.744.809			30	419.500.000	0	89.362.000	-	89.362.000	-	21,30	-	89.362.000	-	5,84	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Dieminas Data Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Data yang Tersedia	Jenis	550	136.576.008			520	37.428.600	248	2.862.000	248	2.862.000	47,69	7,65	248,00	2.862.000	45,09	2,10	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	3.405.712.853			100	976.769.200		14.519.100	-	14.519.100	-	1,49	-	14.519.100	-	0,43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan Bahan Pustaka Perpustakaan	Perpustakaan	1572	2.902.773.133			524	832.524.500		14.519.100	-	14.519.100	-	1,74	-	14.519.100	-	0,50	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan	Kunjungan	127000	446.258.337			37000	127.988.300		11.019.100	-	11.019.100	-	8,61	-	11.019.100	-	2,47	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengembangan Perpustakaan	Perpustakaan	4	1.978.709.038			524	567.500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Literasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang Terbina	kab/kota	10	235.018.333			10	67.404.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Pengadaan Bahan Pustaka	Judul	3300	107.296.587			1000	30.773.000		3.500.000	-	3.500.000	-	11,37	-	3.500.000	-	3,26	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Literasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang Terdata	kab/kota	10	135.490.837			10	38.859.200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	624.349.821			100	179.065.500		2.046.400	-	2.046.400	-	1,14	-	2.046.400	-	0,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam	Eksemplar	7500	170,945,816.71			2500	49,027,800.00		-	-	-	-		-	-	-		
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Pengelolaan Koleksi Deposit yang tersedia	Eksemplar	7500	170,945,816.71			500	49,027,800.00		-	-	-	-		-	-	-		
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah		Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi	Eksemplar	2250	224,357,013.90			700	64,346,300.00		-	-	-	-		-	-	-		
	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Katalog yang terhimpun (hunting)	Judul	2650	126,867,152.76			500	36,385,900.00		-	-	-	-		-	-	-		
	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi yang terhimpun (hunting)	Judul	690	97,489,861.14			200	27,960,400.00		-	-	-	-		-	-	-		
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi		Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah	Naskah	30	229,046,990.16			10	65,691,400.00		2.046.400	-	2.046.400	-		-	2.046.400	-		
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	Naskah	30	102,483,181.33			10	29,392,500.00		-	-	-	-		-	-	-		
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang didayagunakan dan dilayankan secara daring (Online)	Naskah	30	126,563,808.82			10	36,298,900.00		2.046.400	-	2.046.400	-		-	2.046.400	-		
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					32.331.026.285				8.891.808.800		1.470.099.434		1.470.099.434	8,34	6,37		89.519.100	5,20	1,72	
Misi NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah																				
Tujuan :		Indeks Kesehatan	Point	73,04615385				71,96923077												
Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing																				
Sasaran :		Angka Harapan Hidup	Tahun	67,48				66,78												
Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat																				
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	490.192.636.948			85	150.429.928.842		17.791.964.265	-	17.791.964.265	-	11,83	-	17.791.964.265	-	3,63	Dinas Kesehatan
		Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	97				97				-	-	-		-	-	-		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar	%	80				65				-	-	-		-	-	-		
		Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100				100				-	-	-		-	-	-		
		Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%	100				80				-	-	-		-	-	-		
		Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100				94				-	-	-		-	-	-		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%	100				100				-	-	-		-	-	-		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					389.682.139				119.018.839,00		5.000.000	-	5.000.000		4,20	-	5.000.000		1,28	
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				389.682.139				119.018.839,00		5.000.000	-	5.000.000		4,20	-	5.000.000		1,28	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.634.345.730				501.964.400,00		15.160.000	-	15.160.000		3,02	-	15.160.000		0,93	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				266.672.510				81.904.400,00		10.160.000	-	10.160.000		12,40	-	10.160.000		3,81	
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.367.673.220				420.060.000,00		5.000.000	-	5.000.000		1,19	-	5.000.000		0,37	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					182.411.964.543				56.025.056.800,00		17.551.263.000	-	17.551.263.000		31,33	-	17.551.263.000		9,62	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				774.614.349				237.911.000,00		-	-	-		-	-	-	-		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				655.641.495				201.370.300,00		2.430.000	-	2.430.000		1,21	-	2.430.000		0,37	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				2.945.529.741				904.674.600,00		38.010.000	-	38.010.000		4,20	-	38.010.000		1,29	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				3.561.835.085				1.093.963.400,00		-	-	-		-	-	-	-		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1.836.434.213				564.032.800,00		37.950.000	-	37.950.000		6,73	-	37.950.000		2,07	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1.930.300.173				592.862.300,00		42.950.000	-	42.950.000		7,24	-	42.950.000		2,23	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2.734.984.709				840.008.900,00		132.378.600	-	132.378.600		15,76	-	132.378.600		4,84	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				140.003.686				43.000.000,00		-	-	-		-	-	-	-		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				725.817.529				222.923.800,00		38.840.000	-	38.840.000		17,42	-	38.840.000		5,35	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA				432.172.821				132.735.300,00		-	-	-		-	-	-	-		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganana nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				10.500.276.470				3.225.000.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				142.013.256.528				43.617.208.900,00		17.211.484.400	-	17.211.484.400		39,46	-	17.211.484.400		12,12	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				744.914.032				228.789.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				321.070.779				98.612.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1.119.412.172				343.810.400,00		37.220.000	-	37.220.000		10,83	-	37.220.000		3,32	
	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				192.098.081				59.000.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				1.041.522.260				319.887.700,00		5.000.000	-	5.000.000		1,56	-	5.000.000		0,48	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				9.767.699.042				3.000.000.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				295.152.515				90.651.600,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik				281.032.330				86.314.800,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional				27.023.967				8.300.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				371.172.564				114.000.000,00		5.000.000	-	5.000.000		4,39	-	5.000.000		1,35	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					1.140.500.272				350.287.289,00		41.160.000	-	41.160.000		11,75	-	41.160.000		3,61	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1.031.427.633				316.787.289,00		41.160.000	-	41.160.000		12,99	-	41.160.000		3,99	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet				109.072.639				33.500.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				310.078.862				95.236.000,00		5.000.000	-	5.000.000		5,25	-	5.000.000		1,61	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				310.078.862				95.236.000,00		5.000.000	-	5.000.000		5,25	-	5.000.000		1,61	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					3.042.202.633				929.166.080,00		20.085.400		20.085.400		2,16	-	20.085.400		0,66	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)				2.745.067.922				838.413.580,00		20.085.400		20.085.400		2,40	-	20.085.400		0,73	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan				297.134.711				90.752.500,00		-		-		-	-	-		-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					33.543.375				10.245.000,00		37.220.000		37.220.000		363,30	-	37.220.000		110,96	
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				33.543.375				10.245.000,00		37.220.000		37.220.000		363,30	-	37.220.000		110,96	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					953.424.179				291.200.000,00		117.075.865		117.075.865		40,20	-	117.075.865		12,28	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				953.424.179				291.200.000,00		117.075.865		117.075.865		40,20	-	117.075.865		12,28	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	3	3.651.104.864			2	760.915.500		43.875.200	-	43.875.200	-	5,77	-	43.875.200	-	1,20	Dinas Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					488.903.921				103.767.000,00		16.275.200	-	16.275.200		15,68	-	16.275.200		3,33	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan				120.743.018				25.627.000,00		1.551.000	-	1.551.000		6,05	-	1.551.000		1,28	
	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				368.160.903				78.140.000,00		14.724.200	-	14.724.200		18,84	-	14.724.200		4,00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					2.916.233.419				618.953.500,00		27.600.000	-	27.600.000		4,46	-	27.600.000		0,95	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				2.625.342.018				557.213.500,00		17.600.000	-	17.600.000		3,16	-	17.600.000		0,67	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				290.891.402				61.740.000,00		10.000.000	-	10.000.000		16,20	-	10.000.000		3,44	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	95	239.953.724			30	32.181.200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)					202.201.567				27.118.100,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK				202.201.567				27.118.100,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)					37.752.156				5.063.100,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				37.752.156				5.063.100,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	90	163.139.610.602			83	52.457.840.808		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rumah Sakit Umum Daerah
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarpras dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM & UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											-	-	-		-	-	-	-	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/kedokteran yang tersedia		1422	559.528.580.056				50.154.050.808		-	-	-		-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	76,19	29.809.896.151			73,81	7.478.712.574		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
		Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80	-			80			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					25.522.964.303				6.403.206.274,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pengembangan Rumah Sakit				-				-		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				5.789.133.722				1.452.379.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				4.017.692.277				1.007.959.424,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan				267.414.492				67.089.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit				1.502.327.632				376.904.250,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				13.946.396.180				3.498.874.600,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					3.131.001.626				785.506.300,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				400.302.622				100.428.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				727.379.057				182.485.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA				285.594.484				71.650.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				1.666.133.906				418.000.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				51.591.557				12.943.300,00		-	-	-		-	-	-		-	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					1.155.930.222				290.000.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				1.155.930.222				290.000.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	80	144.479.341.067			75	36.663.725.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					20.348.493.926				5.163.725.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				20.348.493.926				5.163.725.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					124.130.847.142				31.500.000.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				124.130.847.142				31.500.000.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					831.512.543.356				247.823.303.924		17.835.839.465		17.835.839.465	-	14,59		17.835.839.465	-	4,37	
Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat		Persentase Balita Stunting	%	30,49				31,49												
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase balita Wasting	%	10,41	32.507.781.615			12,41	9.984.270.034		80.340.000	-	80.340.000	-	0,80	-	80.340.000	-	0,25	Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					32.507.781.615				9.984.270.034,00		80.340.000	-	80.340.000		0,80	-	80.340.000		0,25	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				2.224.629.923				683.261.200,00		38.730.000	-	38.730.000		5,67	-	38.730.000		1,74	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				30.283.151.692				9.301.008.834,00		41.610.000	-	41.610.000		0,45	-	41.610.000		0,14	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	80	5.059.563.209			50	1.228.024.250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					4.272.631.263				1.037.025.250,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				4.272.631.263				1.037.025.250,00		-	-	-		-	-	-		-	
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					263.681.263				63.999.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				263.681.263				63.999.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi					523.250.683				127.000.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				523.250.683				127.000.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					37.567.344.824				11.212.294.284		80.340.000		80.340.000	-	13,10	-	80.340.000	-	0,22	
Tujuan : Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing		Indeks Pendidikan	Point	63,10				62,39												
Sasaran : Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79				13,68												
		Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7,07				7,01												
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	100	1.486.214.496.782			99,15	473.402.998.477			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	95,28				93,40				-	-			-	-	-		
		Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	98,02				96,68				-	-	-		-	-	-		
		Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70,6				69,4				-	-	-		-	-			
		Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1				1,01				-	-	-		-	-	-		
		Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	18				1:18				-	-	-		-	-	-		
		Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:10				1:14				-	-	-		-	-	-		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Persentase Angka Drop Out (DO) SMA			739.558.577.718				239.626.744.750		819.222.300	-	819.222.300			-	819.222.300			
		Persentase Akreditasi SMA minimal B										-	-			-	-			
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru			197.109.172.830				62.891.729.000		-	-	-	-	-	-	-			
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas			23.338.162.601				7.371.520.000		-	-	-	-	-	-	-			
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pagar Sekolah) yang dibangun			2.297.322.762				915.894.000		182.886.000	-	182.886.000		19,97	-	182.886.000			
		Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Ibadah) yang dibangun									-	-	-			-	-			
		Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Toilet Sekolah) yang dibangun									-	-	-			-	-			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi			313.410.326				311.190.300		190.102.800	-	190.102.800		61,09	-	190.102.800			
	Rehabilitasi Asrama Sekolah				-				183.000.000		183.000.000	-	183.000.000		100,00	-	183.000.000			
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebeluer Sekolah yang diadakan			1.251.368.765				578.187.700		-	-	-		-	-	-			
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah (Buku Paket, Buku Tulis dan Alat Tulis Siswa SMA :pemuhan SPM) yang diadakan							6.900.800		-	-	-		-	-	-			
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Sekolah (Buku Paket, Buku Tulis dan Alat Tulis Siswa SMA :pemuhan SPM) yang diadakan			3.185.496.284				1.007.557.000		-	-	-		-	-	-			
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik								1.147.000		-	-	-		-	-	-			
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas				156.631.512				1.327.635.100		208.745.000	-	208.745.000		15,72	-	208.745.000			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah				1.206.190.452				344.727.800,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	208.215.004.195			100	66.960.761.300		20.926.827.700	-	20.926.827.700	-	31,25	-	20.926.827.700	-	10,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100				99,55				-	-	-		-	-	-		
		Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	100				70				-	-	-		-	-	-		
		Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	100				50				-	-	-		-	-	-		
		Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		80				5,5				-	-	-		-	-	-		
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Provinsi					208.215.004.195				66.960.761.300,00		20.926.827.700	-	20.926.827.700		31,25	-	20.926.827.700		10,05	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				204.926.015.690				65.903.041.300,00		20.816.886.600	-	20.816.886.600		31,59	-	20.816.886.600		10,16	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				3.288.988.506				1.057.720.000,00		109.941.100	-	109.941.100		10,39	-	109.941.100		3,34	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	6,5	194.889.101			100	60.769.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					146.783.381				45.769.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				105.871.069				33.012.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				40.912.312				12.757.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					48.105.720				15.000.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				11.224.668				3.500.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				36.881.052				11.500.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	100	831.855.187			35	200.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi					831.855.187				200.000.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi				831.855.187				200.000.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11.296.717.332			100	3.245.457.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100				100			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Pelatihan Kecakapan Pemuda	Orang	480	11.196.717.332			0	2.271.242.250		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tk. Provinsi yang terseleksi (Orang)	Orang	45	534.060.283			0	12.000.000		-	-	-		-	-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganana nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Dilatih (Orang)	Orang	300	479.287.279			0	2.130.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional (Orang)	Orang	1200	1.799.106.230			0	13.470.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan (Orang)	Orang	6	971.920.387			0	227.257.250			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi	Lembaga	60	7.175.198.742			20	2.015.705.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan (Orang)	Orang	180	237.144.411			0	680.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Presentase Pembinaan Atlet Berprestasi	%	100	31.488.202.013			100	8.845.877.100		2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	22,61	-	2.000.000.000	-	6,35	Dinas Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang MerjadiKewenangan Daerah Provinsi		Presentase Sarana Prasarana Olahraga yang Terstandar (%)	%	50	7.994.773.702			40	2.150.176.850			-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana Prasarana Oahraga yang Dibangun (Orang)	Orang	6	7.994.773.702			0	2.150.176.850			-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		Jumlah Medali Yang Diperoleh	Medali	45	4.997.845.464			0	30.122.200			-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Event Pemassalan Olahraga	Event	15	341.995.244			2	30.122.200			-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Partisipasi dan Kelkutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan SingleEvent	Jumlah Peserta Kejuaraan Tk. Nasional dan Internasional (Orang)	Orang	450	4.655.850.220			0	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Jumlah Cabor Yang Dibina	Cabor	3	4.203.011.832			3	1.039.564.300			-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlit yang Dibina (Orang)	Orang	36	4.203.011.832			12	1.039.564.300			-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Organisasi Keolahraga yang Dibina	Lembaga	30	14.292.571.014			10	4.015.165.000		2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	49,81	-	2.000.000.000	-	13,99	
-	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Difasilitasi (Lembaga)	Lembaga	30	14.292.571.014			10	4.015.165.000		2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	49,81	-	2.000.000.000	-	13,99	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					1.740.228.049.346				553.283.712.177		22.926.827.700		22.926.827.700	-	6,52	-	22.926.827.700	-	1,84	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Misi NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan																				
Tujuan : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	68,25				67,72												
Sasaran : Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air	Point	43,03				42,83												
		Indeks Kualitas Udara	Point	87,59				87,53												
		Indeks Kualitas Air Laut	Point	87,66				87,6												
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	24,24242424	1.024.902.303			51,51515152	318.975.200		57.392.138	-	57.392.138	-	17,99	-	57.392.138	-	5,60	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Dokumen RPPLH, IKPLHD, dan IKLH yang disusun	Dokumen	9	602.571.166			3	187.535.200		25.483.200	-	25.483.200	-	13,59	-	25.483.200	-	4,23	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH yang tersedia	Dokumen	1	445.639.676			1	138.694.200		21.512.200	-	21.512.200	-	15,51	-	21.512.200	-	4,83	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH yang tersedia	Dokumen	6	156.931.490			2	48.841.000		3.971.000	-	3.971.000	-	8,13	-	3.971.000	-	2,53	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi	Dokumen	25	422.331.136			15	131.440.000		31.908.938	-	31.908.938	-	24,28	-	31.908.938	-	7,56	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Kawasan Strategis dan dokumen KLHS kab/kota yang divalidasi	Dokumen	10	218.812.769			6	68.100.000		15.360.000	-	15.360.000	-	22,56	-	15.360.000	-	7,02	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun/divalidasi	Dokumen	12	133.665.363			8	41.600.000		16.548.938	-	16.548.938	-	39,78	-	16.548.938	-	12,38	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun/dilaksanakan	Dokumen	3	69.853.004			1	21.740.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	30	2.835.284.286			10	882.411.299		56.860.000	-	56.860.000	-	6,44	-	56.860.000	-	2,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup		Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	titik sampel	846	2.181.040.532			282	678.794.299		50.000.000	-	50.000.000	-	7,37	-	50.000.000	-	2,29	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel	846	321.310.968			282	100.000.000		50.000.000	-	50.000.000	-	50,00	-	50.000.000	-	15,56	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Peningkatan Jumlah Parameter yang mampu diuji di Balai Laboratorium Lingkungan	parameter	25	1.859.729.564			5	578.794.299		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	lokasi	4	654.243.754			2	203.617.000		6.860.000	-	6.860.000	-	3,37	-	6.860.000	-	1,05	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pemantauan kualitas air sungai, kualitas udara, dan air laut	kab/kota	10	654.243.754			10	203.617.000		6.860.000	-	6.860.000	-	3,37	-	6.860.000	-	1,05	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	3	232.926.464			1	23.583.400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Persentase terbangunnya jumlah taman kehati	%	100	232,926,464			100	23,583,400		-	-	-	-	-	-	-	-		
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kegiatan pendukung Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan	kegiatan	3	232,926,464			1	23,583,400		-	-	-	-		-	-	-		
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B)		Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	232.426.464			210	23.083.400		3.080.500	-	3.080.500	-	13,35	-	3.080.500	-	1,33	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengumpulan Limbah B Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3 yang tertib aturan	unit usaha	14	232.426.464			14	23.083.400		3.080.500	-	3.080.500	-	13,35	-	3.080.500	-	1,33	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3 yang tertib aturan	unit usaha	14	232.426.464			14	23.083.400		3.080.500	-	3.080.500	-	13,35	-	3.080.500	-	1,33	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/kegiatan	30	605.251.864			20	188.369.500		46.880.400	-	46.880.400	-	24,89	-	46.880.400	-	7,75	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah pemegang izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi	unit usaha	60	605.251.864			20	188.369.500		46.880.400	-	46.880.400	-	24,89	-	46.880.400	-	7,75	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha/ kegiatan yang difasilitasi perijinan lingkungannya	usaha/kegiatan	60	304.909.971			20	94.895.600		25.596.500	-	25.596.500	-	26,97	-	25.596.500	-	8,39	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diawasi	usaha/kegiatan	60	300.341.893			20	93.473.900		21.283.900	-	21.283.900	-	22,77	-	21.283.900	-	7,09	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%	30	632.449.873			10	196.834.200		34.194.000	-	34.194.000	-	17,37	-	34.194.000	-		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah kelompok peduli lingkungan yang dibina	kelompok	30	632.449.873			10	196.834.200		34.194.000	-	34.194.000	-	17,37	-	34.194.000	-	5,41	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat yang terbina	kelompok	30	632.449.873			10	196.834.200		34.194.000	-	34.194.000	-	17,37	-	34.194.000	-	5,41	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok	0	-			0	-			-	-			-	-			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	60	641.333.479			20	199.599.000		43.679.390	-	43.679.390	-	21,88	-	43.679.390	-	6,81	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	Pengaduan	60	641.333.479			20	199.599.000		43.679.390	-	43.679.390	-	21,88	-	43.679.390	-	6,81	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang tertangani	Pengaduan	45	319.536.689			15	99.447.800		24.808.190	-	24.808.190	-	24,95	-	24.808.190	-	7,76	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup yang difasilitasi	kasus	15	321.796.790			5	100.151.200		18.871.200	-	18.871.200	-	18,84	-	18.871.200	-	5,86	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					#VALUE!				1.832.855.999		242.086.428		242.086.428	-	16,95	-	242.086.428	-	4,97	
Sasaran : Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	69,7				67,7												
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	100	61.710.986.449			66,74127265	18.572.218.206		846.667.300	-	846.667.300	-	4,56	-	846.667.300	-	1,37	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	-			10				-	-	-		-	-	-		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	150	333.701.361			50	370.380.700		25.933.500	-	25.933.500	-	7,00	-	25.933.500	-	7,77	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	150	333.701.361			50	370.380.700		25.933.500	-	25.933.500	-	7,00	-	25.933.500	-	7,77	
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)					693.158.700				231.052.900		4.680.000	-	4.680.000		2,03	-	4.680.000		0,68	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan				693.158.700				231.052.900		4.680.000	-	4.680.000		2,03	-	4.680.000		0,68	
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		tersedianya data dan Informasi pemanfaaaatan kawasan hutan	dokumen	3	846.111.385			1	1.184.029.700		33.952.500	-	33.952.500	-	2,87	-	33.952.500	-	4,01	
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen data dan Informasi Pemanfaatan Hutan yang tersusun	Dokumen	3	548.256.118			1	120.631.000		14.932.500	-	14.932.500	-	12,38	-	14.932.500	-	2,72	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi				121.668.600				40.556.200		-	-	-			-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung				83.783.700				27.927.900		-	-	-			-	-			
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya evaluasi kinerja KPHP	kegiatan	3	159.370.240			1	35.600.000		16.100.000	-	16.100.000	-	45,22	-	16.100.000	-	10,10	
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya evaluasi kinerja KPHP	kegiatan	3	138.485.027			1	35.600.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan				2.771.143.800				923.714.600		2.920.000	-	2.920.000			-	2.920.000			
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	16	1.224.773.148			16	9.525.242.000		78.125.700	-	78.125.700	-	0,82	-	78.125.700	-	6,38	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen RTnRL yang disusun	dokumen	3	206.346.546			1	36.220.200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah kegiatan movev pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan	kegiatan	24	534.340.140			11	7.751.630.200		25.760.000	-	25.760.000	-	0,33	-	25.760.000	-	4,82	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				4.760.195.400				1.586.731.800		32.880.000	-	32.880.000			-	32.880.000			
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Lokasi RHL yang dibina dan dimonitoring	KPH	24	484.086.462			11	150.659.800		19.485.700	-	19.485.700	-	12,93	-	19.485.700	-	4,03	
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	805	2.068.695.441			505000	5.099.480.506		570.632.800	-	570.632.800	-	11,19	-	570.632.800	-	27,58	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan				4.157.716.200				1.385.905.400		223.897.000	-	223.897.000			-	223.897.000		5,39	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan				6.388.465.518				2.129.488.506		270.140.000	-	270.140.000			-	270.140.000		4,23	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah kasus Tipihut yang ditangani	kasus	30	1.311.290.624			10	428.106.400		46.190.800	-	46.190.800	-	10,79	-	46.190.800	-	3,52	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan	kegiatan	1	437.308.404			1	511.586.500		28.870.000	-	28.870.000	-	5,64	-	28.870.000	-	6,60	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani	titik	90	320.096.412			30	644.393.700		1.535.000	-	1.535.000	-	0,24	-	1.535.000	-	0,48	
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Terlaksananya pengolahan HHBK di tingkat tapak	Unit	4,575	321.310.968			1525	2.022.219.600		114.975.000	-	114.975.000	-	5,69	-	114.975.000	-	35,78	
	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	monev kegiatan pengolahan HHBK yang dilaksanakan	kegiatan	3	321.310.968			1	1.844.167.700		114.975.000	-	114.975.000	-	6,23	-	114.975.000	-	35,78	
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				534.155.700				178.051.900		-	-	-			-	-			
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun		Terlaksananya pengolahan HHK dengan kapasitas produksi < 6000	Industri	3	458.873.190			1	139.812.800		18.367.800	-	18.367.800	-	13,14	-	18.367.800	-	4,00	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	industri	16	458.873.190			16	139.812.800		18.367.800	-	18.367.800	-	13,14	-	18.367.800	-	4,00	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30503,3	2.843.299.456			30503,3	884.905.820		50.420.300	-	50.420.300	-	5,70	-	50.420.300	-	1,77	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola	unit	1	1.927.987.906			1	600.038.000		28.200.000	-	28.200.000	-	4,70	-	28.200.000	-	1,46	
	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	luas kawasan TAHURA yang diamankan	ha	3,155	585.814.157			3155	182.320.000		25.880.000	-	25.880.000	-	14,19	-	25.880.000	-	4,42	
	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Jumlah TSL endemik yang terfasilitasi pengawetannya	jenis	1	321.310.968			1	100.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Jumlah kawasan ekosistem wilayah TAHURA yang dipulihkan	ha	122	128.524.387			122	40.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Sarpras objek wisata yang dibangun	unit	1	715.617.362			1	222.718.000		1.070.000	-	1.070.000	-	0,48	-	1.070.000	-	0,15	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah KTH mitra konservasi Tahura yang terbentuk	kelompok	2	144.589.936			2	45.000.000		1.250.000	-	1.250.000	-	2,78	-	1.250.000	-	0,86	
	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah dokumen rencana pengelolaan TAHURA yang tersusun	Dokumen	4	32.131.097			4	10.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	penangkar	72	345.259.560			24	107.453.400		1.763.400	-	1.763.400	-	1,64	-	1.763.400	-	0,51	
	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	penangkar	72	345.259.560			24	107.453.400		1.763.400	-	1.763.400	-	1,64	-	1.763.400	-	0,51	
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang dikelola	kelompok	8	570.051.990			8	177.414.420		20.456.900	-	20.456.900	-	11,53	-	20.456.900	-	3,59	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat pada KEE yang ditingkatkan kapasitasnya	kelompok	16	195.869.624			16	60.959.520		5.081.900	-	5.081.900	-	8,34	-	5.081.900	-	2,59	
	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah KEE dan cagar biosfer yang difasilitasi pengembangannya	kelompok/lembaga	8	374.182.366			8	116.454.900		15.375.000	-	15.375.000	-	13,20	-	15.375.000	-	4,11	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	48,67	2.125.242.316			13,27	661.428.500		64.395.465	-	64.395.465	-	9,74	-	64.395.465	-	3,03	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah Penyuluh dan Penyuluh Kehutanan Swadaya	orang	90	659.021.648			30	205.104.000		64.395.465	-	64.395.465	-	31,40	-	64.395.465	-	9,77	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	5	137.521.094			1	42.800.000		4.400.000	-	4.400.000	-	10,28	-	4.400.000	-	3,20	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya dari Blue ke Gold/Madya	KTH	17	197.927.556			6	61.600.000		9.940.000	-	9.940.000	-	16,14	-	9.940.000	-	5,02	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	Kelompok	3	323.572.997			1	100.704.000		50.055.465	-	50.055.465	-	49,71	-	50.055.465	-	15,47	
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4	14.296.328.273			4	4.449.374.500		33.402.000	-	33.402.000	-	0,75	-	33.402.000	-	0,23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah KTA yang terbangun	Unit	578	905.081.587			130	281.684.000		33.402.000	-	33.402.000	-	11,86	-	33.402.000	-	3,69	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	dokumen	468	328.328.399			100	102.184.000		1.222.000	-	1.222.000	-	1,20	-	1.222.000	-	0,37	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah lembaga pengelolaan DAS yang dikembangkan	lembaga	110	255.442.220			30	79.500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah kegiatan movebangunan Konservasi Tanah dan Air	kegiatan	190	321.310.968			30	100.000.000		32.180.000	-	32.180.000	-	32,18	-	32.180.000	-	10,02	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90,31	3.017.590.900			89,07	680.998.000		30.000.000	-	30.000.000	-	4,41	-	30.000.000	-	0,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		Tersedianya Perda RTR yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang Dok	dokumen	10	571.551.333			1	117.173.700,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				571.551.333				117.173.700,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang					283.059.457				58.030.000,00		9.000.000	-	9.000.000		15,51	-	9.000.000		3,18	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota				283.059.457				58.030.000,00		9.000.000	-	9.000.000		15,51	-	9.000.000		3,18	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		Terwujudnya sistem informasi/databas e pemanfaatan ruang (kawasan)	Dokumen	997395000	1.047.397.547				214.726.900,00		10.500.000	-	10.500.000		4,89	-	10.500.000	-	1,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				618.912.453				126.883.200,00		10.500.000	-	10.500.000		8,28	-	10.500.000		1,70	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sistem Informasi Penataan Ruang				428.485.094				87.843.700,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		Tersedianya Bahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	dokumen	341342500	273.496.018				56.069.400,00		10.500.000	-	10.500.000		18,73	-	10.500.000	-	3,84	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				273.496.018				56.069.400,00		10.500.000	-	10.500.000		18,73	-	10.500.000		3,84	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					83.993.447.393				25.248.925.026		1.024.885.065		1.024.885.065	-	8,83	-	1.024.885.065	-	4,75	
Tujuan : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan		Neraca pengelolaan sampah (%)	%	100				70												
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan		Persentase Penanganan Sampah	%	70				50												
		Persentase Pengurangan Sampah	%	30				20												
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								70	4.756.110.800		1.008.937.339	-	1.008.937.339	-	21,21	-	1.008.937.339	-	6,34	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					15.916.448.484				4.756.110.800		1.008.937.339	-	1.008.937.339		21,21	-	1.008.937.339		6,34	
	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional				10.380.853.500				3.460.284.500		793.041.800	-	793.041.800			-	793.041.800			
	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional				200.691.900				66.897.300		12.330.000	-	12.330.000			-	12.330.000			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus				3.148.514.551				1.084.590.800		203.565.539	-	203.565.539		18,77	-	203.565.539		6,47	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				352.014.600				117.338.200		-	-	-			-	-			
	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				81.000.000				27.000.000		-	-	-			-	-		6,34	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					15.916.448.484				4.756.110.800		1.008.937.339		1.008.937.339	-	21,21	-	1.008.937.339	-	4,93	
Misi NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggungan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi																				
Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas		Indeks Daya Beli (Point)	%	75,5637493				73,7977463												
Sasaran : Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan		Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	17814				13362												
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								100	493.277.000	-	13.613.800	-	13.613.800	-	2,76	-	13.613.800	-	1,24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI		jumlah kebijakan		1	779.890.311			1	212.101.000	-	3.017.800	-	3.017.800	-	1,42	-	3.017.800	-	0,39	
	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah insentif/kebijakan yang diberikan kepada investor		1	367.899.845			1	100.055.000	0	1.979.400	0	1.979.400	-	1,98	0	1.979.400	-	0,54	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Jumlah dokumen money	Dokumen	1	411.990.466			1	112.046.000	0	1.038.400	0	1.038.400	-	0,93	0	1.038.400	-	0,25	
PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI								2	281.176.000	-	10.596.000	-	10.596.000	-	3,77	-	10.596.000	-	1,02	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah dokumen evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal	Dokumen	1	253.433.740			1	68.924.500	-	8.383.000	-	8.383.000	-	12,16	-	8.383.000	-	3,31	
	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Jumlah peta potensi		1	780.443.696			1	212.251.500		2.213.000	-	2.213.000	-	1,04	-	2.213.000	-	0,28	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								100	714.948.000			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Promosi	Dokumen	2	2.528.846.721			2	714.948.000	-	1.799.700	-	1.799.700	-	0,25	-	1.799.700	-	0,07	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen laporan	Dokumen	1	1.270.021.300			1	345.398.300	-	1.799.700	-	1.799.700	-	0,52	-	1.799.700	-	0,14	
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen laporan event	Dokumen	1	1.258.825.421			1	369.549.700	-	770.000	-	770.000	-	0,21	-	770.000	-	0,06	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	93	1.953.548.364			87	531.292.100	-	1.029.700	-	1.029.700	-	0,19	-	1.029.700	-	0,05	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/ kota		Jumlah Layanan Perizinan kewenangan Provinsi lintas Kab/Kota		4	300.577.354			4	81.745.800	2	44.300.600	2	44.300.600	50,00	54,19	2,00	44.300.600	50,00	14,74	
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah penerbitan izin penanaman modal (NIB) yang ruang lingkupnya lintas kab/kota		4	300.577.354			4	81.745.800		7.170.000	-	7.170.000	-	8,77	-	7.170.000	-	2,39	
Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi		Jumlah Dokumen Layanan Perizinan kewenangan daerah provinsi	Dokumen	3	1.652.971.008			3	449.546.300	-	7.170.000	-	7.170.000	-	1,59	-	7.170.000	-	0,43	
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik	Jumlah permohonan dan penerbitan izin dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi		3700	1.008.309.951			3500	274.222.600		37.130.600	-	37.130.600	-	13,54	-	37.130.600	-	3,68	
	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah pemantuan pemenuhan komitmen		10	437.776.364			10	119.058.800	2	29.855.600	2	29.855.600	20,00	25,08	2,00	29.855.600	20,00	6,82	
	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah dokumen pengaduan	Dokumen	2	206.884.693			2	56.264.900	0	6.276.500	0	6.276.500	-	11,16	0	6.276.500	-	3,03	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen	60	2.702.918.671			50	735.092.800	0	998.500	0	998.500	-	0,14	0	998.500	-	0,04	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang menyampaikann LKPM		500	2.702.918.669			500	735.092.800	100	58.063.900	100	58.063.900	20,00	7,90	100,00	58.063.900	20,00	2,15	
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dipantau		4	430.339.312			4	117.036.200	2	58.063.900	2	58.063.900	50,00	49,61	2,00	58.063.900	50,00	13,49	
	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dibina		5	1.355.125.280			5	368.543.400		10.210.000	-	10.210.000	-	2,77	-	10.210.000	-	0,75	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang diawasi		20	917.454.077			20	249.513.200	1	18.905.300	1	18.905.300	5,00	7,58	1,00	18.905.300	5,00	2,06	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	428.183.869			100	116.450.000	13	28.948.600	13	28.948.600	13,00	24,86	13,00	28.948.600	13,00	6,76	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPPTSP	Dokumen	2	428.183.869			2	116.450.000	-	300.000	-	300.000		0,26	-	300.000		0,07	
	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPPTSP secara OSS	Dokumen	2	428.183.869			2	116.450.000	-	300.000	-	300.000	-	0,26	-	300.000	-	0,07	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					8.812.801.396				2.591.059.900		44.590.600		44.590.600	6,32	8,96		44.590.600	6,32	2,46	
Sasaran : Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,88				23,52		22,88	300.000		300.000	-	#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pertumbuhan Populasi Ternak	%	10	135.417.101.158			9	44.457.563.187		4.544.208.500	-	4.544.208.500	-	10,22	-	4.544.208.500	-	3,36	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		Jumlah distributor obat hewan yang diawasi	(toka/depo)	20	63.125.609			10	21.702.388			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Sampel Obat Hewan yang diambil	(Sampel)	10	36.586.113			10	11.142.388			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Laporan yang dihasilkan	(Laporan)	1	26.539.495			1	10.560.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumh bibit ternak yang diadakan	(ekor)	1000	39.022.484.195			1000	46.835.374.300		4.221.368.500	-	4.221.368.500	-	9,01	-	4.221.368.500	-	10,82	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak Sapi/Kerbau/Kambing/U nggas yang diadakan	(ekor)	1000	37.075.699.230			1000	46.670.648.700	-	4.221.368.500	-	4.221.368.500	-	9,05	-	4.221.368.500	-	11,39	
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Kelompok pakan	(kelompok)	30	1.946.784.965			6	164.725.600			-	-	-	-	-	-	-	-	
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah lahan HPT yang dikelola	(Ha)	6	1.277.279.138			6	1.065.396.500		158.840.000	-	158.840.000	-	14,91	-	158.840.000	-	12,44	
	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan yang dihasilkan	Laporan	1	805.060.426			1	670.643.000	0	103.240.000	-	103.240.000	-	15,39	-	103.240.000	-	12,82	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan yang dihasilkan/ Jumlah produksi Benih HMT	(ton)	1 laporan / 15 ton	472.218.712			1 laporan / 5 ton	394.753.500		55.600.000	-	55.600.000		14,08	-	55.600.000		11,77	
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provins		Peningkatan Populasi ternak			2.048.204.537				1.249.865.600		60.000.000	-	60.000.000		4,80	-	60.000.000		2,93	
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Tersedianya Pakan Ternak / Tersedianya Semen Beku	ton	145000dosis +20 ton + 50 4on	1.867.956.717			365 Ton + 15 ton +2 ton / 100000 Dosis	1.067.038.350		60.000.000	-	60.000.000		5,62	-	60.000.000		3,21	
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Terujianya Benih/Bibit Ternak	(saampel)	200	180.247.820			200	172.681.600			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak	(kali)	1	10.534.446			1	10.145.650			-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi				85	1.735.256.154			75	708.120.000	-	104.000.000	-	104.000.000	-	14,69	-	104.000.000	-	5,99	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah ternak	(ekor)	85	1.735.256.154			75	708.120.000	-	104.000.000	-	104.000.000	-	14,69	-	104.000.000	-	5,99	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%	100	1.707.732.485			100	560.650.200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah unit pelayanan yang terpelihara	(unit)	9	277.207.623			9	11.461.600			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Klinik Pelayanan Kesehatan Hewan		1	206.477.480			1	1.442.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	(unit)	3	70.730.143			3	10.019.600			-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang dikembangkan	(lokasi)	2	375.657.624			2	182.741.600			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Terna	Jumlah Laporan	(laporan)	1	219.957.384			1	170.739.400			-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah produk hasil peternakan yang dipamerkan	(jenis)	10	260.536.230			10	123.410.600		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelompok berbasis korporasi		3	175.385.402			3	46.752.800		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Terlatihnya peternak tentang teknologi pakan										-	-			-	-			
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	jumlah koorporasi terbentuk	(lembaga)	3	93.330.599			3	19.896.400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi yang dibina	(lembaga)	5	44.498.718			3	14.106.400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi yang dievaluasi	(lembaga)	5	37.556.085			2	12.750.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	%	2,05	64.204.913.319			1,93	20.209.054.200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			14.385.072.389				4.586.290.000			-	-		-	-	-		-	
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				14.385.072.389				4.586.290.000			-	-		-		-		-	
		Jumlah/jenis pupuk (bersubsidi) yang diawasi		5				5				-	-		-		-		-	
		Jumlah sample pestisida yang diawasi di 10 kabupaten/kota		30								-	-		-		-		-	
		Jumlah Alat dan Mesin Pertanian pra panen yang diadakan/ diserahkan ke kelompok tani		75				176				-	-		-		-		-	
		Jumlah Alat dan Mesin Pertanian pasca panen dan pengolahan hasil yang diadakan/ diserahkan ke kelompok tani		45				3				-	-		-		-		-	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Persentase ketersediaan benih tanaman		100	49.571.809.080			100	15.622.764.200			-	-		-		-		-	
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah kegiatan Penerbitan sertifikasi benih yang dilaksanakan		3	399.873.000			1	133.291.000			-	-		-		-		-	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				7.006.789.800				2.335.596.600			-	-		-		-		-	
		Jumlah Sertifikasi Benih Bermutu Hortikultura		115								-	-		-		-		-	
		Jumlah Sertifikasi Benih Bermutu Hortikultura		2750								-	-		-		-		-	
		Jumlah Produksi Benih Bermutu Hortikultura		35000								-	-		-		-		-	
		Jumlah Produksi Benih Bermutu Hortikultura		83000								-	-		-		-		-	
		Luasan bantuan benih hortikultura		148				47,85				-	-		-		-		-	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				6.620.607.880				1.261.266.800			-	-		-		-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Sertifikasi Benih Bermutu Tanaman Pangan		1045								-	-			-	-	-		
		Jumlah Produksi Benih Bermutu Tanaman Pangan		348								-	-			-	-	-		
		Luas bantuan benih tanaman pangan		2370				790				-	-	-		-	-	-		
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				11.892.609.800							-	-			-	-		-	
		Jumlah Sertifikasi Benih Bermutu Tanaman Perkebunan (Kg)		273				86				-	-	-		-	-	-		
		Jumlah Sertifikasi Benih Bermutu Tanaman Perkebunan (Batang)		444612				148204				-	-	-		-	-	-		
		Jumlah Produksi Benih Bermutu Tanaman Perkebunan		5793				1750				-	-	-		-	-	-		
		Luas Bantuan Benih Tanaman Perkebunan		1530				510				-	-	-		-	-	-		
		Luas bantuan pengembangan tanaman perkebunan		1530				510				-	-	-		-	-	-		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%	96,79	267.360.989.055			35,41	104.378.790.100		33.512.114.660	-	33.512.114.660	-	32,11	-	33.512.114.660	-	12,53	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	10	-			2				-	-	-		-	-	-		
Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Bantuan Prasarana Pertanian Yang dibangun		676	274.817.512.028			264	104.378.790.100		33.512.114.660	-	33.512.114.660	-	32,11	-	33.512.114.660	-	12,19	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani Yang Dibuat/dibangun		507	154.611.096.505			207	55.153.625.000		20.005.800.000	-	20.005.800.000	-	36,27	-	20.005.800.000	-	12,94	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Yang Dibuat/dibangun		163	35.937.090.995			55	12.435.949.100		3.305.000.000	-	3.305.000.000	-	26,58	-	3.305.000.000	-	9,20	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Unit prasarana pertanian lainnya yang diadakan		2	63.429.872.528			2	21.949.764.000		10.201.314.660	-	10.201.314.660	-	46,48	-	10.201.314.660	-	16,08	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah UPTD yang dibangun/direhabilitasi		8	20.839.452.000			4	14.839.452.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96,5	1.229.042.136			95,5	360.656.500		58.273.000	-	58.273.000	-	16,16	-	58.273.000	-	4,74	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		[]		5	1.229.042.136			5	360.656.500		58.273.000	-	58.273.000	-	16,16	-	58.273.000	-	4,74	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				1.229.042.136				360.656.500		58.273.000	-	58.273.000		16,16	-	58.273.000		4,74	
		Luasan Pengendalian OPT (Tanaman Pangan)		13124								-	-			-	-	-		
		Luasan Pengendalian OPT (Hortikultura)		1083								-	-			-	-	-		
		Luasan Pengendalian OPT (Perkebunan)		1360								-	-			-	-	-		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	100	18.894.573.000			50	5.431.885.000		550.842.356	-	550.842.356	-	10,14	-	550.842.356	-	2,92	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Yang Dilatih		900	4.197.327.300			300	1.399.109.100		196.712.176	-	196.712.176	-	14,06	-	196.712.176	-	4,69	
	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh ASN/THL yang ditingkatkan kapasitasnya		750	3.436.512.300			250	1.145.504.100		93.321.800	-	93.321.800		8,15	-	93.321.800	-	2,72	
	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah penyuluh Swadaya/Swasta yang ditingkatkan kapasitasnya		150	760.815.000			50	253.605.000		103.390.376	-	103.390.376		40,77	-	103.390.376	-	13,59	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang di bina		345	14.697.245.700			115	4.032.775.900		354.130.180	-	354.130.180	-	8,78	-	354.130.180	-	2,41	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				8.604.246.000				2.001.776.000		322.125.280	-	322.125.280		16,09	-	322.125.280		3,74	
		Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang di bina		115				115				-	-	-		-	-	-		
		Jumlah kegiatan Peda dan Penas yang dilaksanakan/dikuti		2	-			0				-	-			-	-	-		
		Jumlah kegiatan Rembuk KTNA yang difasilitasi		2	-			0				-	-			-	-	-		
		Jumlah Buku Programa Penyuluhan Yang Dibuat		2	-			0				-	-			-	-	-		
		Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan		2	-			0				-	-			-	-	-		
		Jumlah siswa SMKPP Pertanian Mtrm yang difasilitasi		607				607				-	-	-		-	-	-		
		Jumlah siswa SMKPP Pertanian Bima yang difasilitasi		360				360				-	-	-		-	-	-		
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti		5	6.092.999.700			5	2.030.999.900		32.004.900	-	32.004.900	-	1,58	-	32.004.900	-	0,53	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	5.253.465.493			10	1.635.009.700		846.667.300	-	846.667.300	-	51,78	-	846.667.300	-	16,12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	150	333,701,361			50	103,856,200		25.933.500	-	25.933.500	-		-	25.933.500	-		
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	150	333,701,361			50	103,856,200		25.933.500	-	25.933.500	-		-	25.933.500	-		
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)											4.680.000	-	4.680.000			-	4.680.000			
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			3	846,111,385			1	263,331,000		4.680.000	-	4.680.000	-		-	4.680.000	-		
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		tersedianya data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan	dokumen	3	548,256,118			1	170,631,000		33.952.500	-	33.952.500	-		-	33.952.500	-	#VALUE!	
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen data dan Informasi Pemanfaatan Hutan yang tersusun	Dokumen								14.932.500	-	14.932.500			-	14.932.500			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi										-	-	-			-	-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Angganannya s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Pusat		340271,86	600.000.000			244926,54	429.130.000		-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Peserta Mitigasi Bencana		75	60.156.999			25	2.774.689.900		-	-	-	-	-	-	-	-		
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Persetujuan teknis/rekomendasi pemafaatan ruang laut		17	60.156.999			10	50.000.000		1.440.000	-	1.440.000	-	2,88	-	1.440.000	-	2,39	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah SOP yang tersusun		1	3.338.340.368			1	2.774.689.900		-	-	-	-	-	-	-	-		
	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah lokasi yang disurvei, ekspos rencana usaha		17	3.338.340.368			10	2.774.689.900		1.440.000	-	1.440.000	-	0,05	-	1.440.000	-	0,04	
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah Masyarakat Pesisir yang terfasilitasi		20	3.338.340.368			20	2.774.689.900		-	-	-	-	-	-	-	-		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	256572	11.895.178.174			241843	6.336.155.300		68.525.375	-	68.525.375	-	1,08	-	68.525.375	-	0,58	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan Mil		Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan yang tersedia		45	3.555.957.843			36	2.905.695.000		-	-	-	-	-	-	-	-		
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Publikasi Data Statistik Perikanan Tangkap		1	60.000.000			1	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana perikanan tangkap yang tersedia		5	1.023.000.000			0			-	-	-			-	-	-		
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap		45	2.095.957.843			36	2.905.695.000		-	-	-	-	-	-	-	-		
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas GT Sampai Dengan GT		Jumlah kapal yang memperoleh rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		220	380.000.000			0			25.500.000	-	25.500.000			-	25.500.000	-	6,71	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah SOP Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		1	80.000.000						-	-	-			-	-	-		
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah rekomendasi izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang diterbitkan		220	250.000.000			0	-		25.500.000	-	25.500.000			-	25.500.000	-	10,20	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap		1	50.000.000						-	-	-			-	-	-		
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil		Jumlah kapal yang memperoleh rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil		50	55.000.000			50	-		-	-	-	-		-	-	-		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah SOP Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang tersusun		1	25.000.000						-	-	-			-	-	-	-	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh nelayan kecil	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang terfasilitasi		50	30.000.000			50			-	-	-	-		-	-	-	-	
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terdaftar		500	265.000.000			500			-	-	-	-		-	-	-	-	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT	Jumlah SOP Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang disusun		1	25.000.000			1			-	-	-	-		-	-	-	-	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang terdaftar		500	240.000.000			500			-	-	-	-		-	-	-	-	
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM (Unit)		1	5.167.442.138			1	3.280.950.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan yang terbina		1	2.984.965.328				2.065.400.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	pelabuhan yang terbina operasionalnya		1	1.882.476.810				1.215.550.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas GT sampai dengan GT		Jumlah Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terbit		50	77.000.000			50	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah penerbitan persetujuan		50	77.000.000				-			-	-	-		-	-	-	-	
Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas GT Sampai Dengan GT		Jumlah Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang terdaftar		220	119.724.941			200	99.510.400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas GT Sampai Dengan GT	Jumlah SOP Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang tersusun		0	19.724.941						-	-	-	-		-	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT	Jumlah surat pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT		220	100.000.000			200	99.510.400		1.000.000	-	1.000.000	-	1,00	-	1.000.000	-	1,00	
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terdaftar		550	275.000.000			500	49.999.900		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan GT	Jumlah penerbitan pendaftaran kapal		550	275.000.000			500	49.999.900		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1243385	32.728.577.394			1195104	3.022.814.500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang memiliki izin		5	100.000.000			5	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Bidang Usaha Perikanan Budidaya		1	100.000.000			1				-	-	-		-	-	-	-	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		Jumlah Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang tersedia		15	3.953.338.779			15	1.255.424.300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di laut	Jumlah penyediaan Unit prasarana Budidaya Ikan di laut		4	1.253.540.200			0				-	-	-		-	-	-	-	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang tersedia		3	445.825.000			3	345.825.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang tersedia		6	923.450.000			6	609.600.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan air payau dan ikan air tawar yang tersedia		6	399.999.300			6	299.999.300			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah kelompok pembudidaya yang dibina		10	2.184.064.479			0	-			-	-			-	-	-	-	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	99,93	8.942.779.585			99,91	4.851.624.000		390.000	-	390.000	-	0,01	-	390.000	-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Mil		Jumlah Pelaku Usaha yang diperiksa		17	4.851.624.000			12	2.128.630.979		390.000	-	390.000	-	0,02	-	390.000	-	0,01	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan Mil	Jumlah operasi		12	83.600.000			0	166.793.114		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan ruang laut yang terawasi		10	3.869.616.000			10	900.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan Mil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang terawasi		10	898.408.000			0	955.888.808		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan mil	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Budidaya Perikanan yang terawasi		5	30.000.000			-	390.000	-	390.000	-	-	-	-	-	390.000	-	1,30	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Produksi olahan hasil perikanan	Ton	215700	2.897.006.721			213130	615.543.200		5.250.000	-	5.250.000	-	0,85	-	5.250.000	-	0,18	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang difasilitasi penerbitannya		5	120.301.967			5	99.990.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (satu) daerah provinsi	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan		5	-			5	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen data dan informasi yang tersedia		3	120.301.967			3	99.990.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi Pembinaan untuk Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan		7	748.200.988			6	454.999.100		5.250.000	-	5.250.000	-	1,15	-	5.250.000	-	0,70	
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah kegiatan bimbingan dan fasilitasi bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran		5	547.427.611			5	454.999.100		5.250.000	-	5.250.000	-	1,15	-	5.250.000	-	0,96	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah stok ikan yang tersedia dan tersalurkan sebagai bahan baku industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		384270	200.773.377			348544	50.054.100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha bidang penyediaan sarana logistik ikan yang terpantau		15	60.222.089			15	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemberian insentif bagi pelaku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah	Jumlah pelaku usaha yang menerima insentif dan fasilitasi		35	60.222.089			35	50.054.100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					571.512.726.958				197.203.041.146		39.627.711.191		39.627.711.191	1,52	5,10		39.627.711.191	1,23	#VALUE!	
Sasaran : Meningkatkan jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin		Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	100				100												
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	257.570.105.057			85	79.154.494.280		897.780.000	-	897.780.000	-	1,13	-	897.780.000	-		Dinas Kesehatan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					186.631.633.972				57.321.064.000,00		448.890.000		448.890.000		0,78	-	448.890.000		0,24	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan Rumah Sakit				8.139.749.202				2.500.000.000,00		448.890.000		448.890.000		17,96	-	448.890.000		5,51	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				170.209.852.752				52.277.364.000,00		-		-		-	-	-		-	
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan				142.282.816				43.700.000,00		-		-		-	-	-		-	
	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan				8.139.749.202				2.500.000.000,00		-		-		-	-	-		-	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					402.662.974				290.000.000,00		-		-		-	-	-		-	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				402.662.974				290.000.000,00		-		-		-	-	-		-	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					26.643.684.496				8.137.659.080,00		-		-		-	-	-		-	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				22.698.881.872				6.932.816.000,00		-		-		-	-	-		-	
	8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				657.859.409				200.927.000,00		-		-		-	-	-		-	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				-				-		-		-			-	-			
	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan				-				-		-		-			-	-			
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				244.740.582				74.750.000,00		-		-		-	-	-		-	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					43.892.123.615				13.405.771.200,00		448.890.000		448.890.000		3,35	-	448.890.000		1,02	
	Pengembangan Rumah Sakit				1.795.999.700				548.544.000,00		448.890.000		448.890.000		81,83	-	448.890.000		24,99	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				21.801.337.780				6.658.683.200,00		-		-		-	-	-		-	
	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan				20.294.786.135				6.198.544.000,00		-		-		-	-	-		-	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					1.375.949.557				420.250.000,00		117.075.865		117.075.865		27,86	-	117.075.865		0,00	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				1.375.949.557				420.250.000,00		117.075.865		117.075.865		27,86	-	117.075.865		8,51	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	2.356.150.635			100	764.118.500		57.205.859	-	57.205.859	-	7,49	-	57.205.859	-	2,43	Dinas Sosial
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Jumlah PMB, KPO, KTK dan OT yang dipulangkan ke daerah asal	Jiwa	1150	2.356.150.635			350	764.118.500		57.205.859	-	57.205.859	-	7,49	-	57.205.859	-	2,43	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah orang KPO, KTK, PMB dan OT yang diberikan Fasilitas Pemulangan ke Daerah Asal	Jiwa	1150	2.356.150.635			350	764.118.500		57.205.859	-	57.205.859	-	7,49	-	57.205.859	-	2,43	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	4,5	53.397.902.044			2,5	17.317.366.810		1.716.782.602	-	1.716.782.602	-	9,91	-	1.716.782.602	-	3,22	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					8.645.943.057				2.803.948.500		335.554.000	-	335.554.000		11,97	-	335.554.000		3,88	
	Penyediaan Permakanan	Jumah LANSIA terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti	Orang	450	4.872.103.064			150	1.580.062.000		314.554.000	-	314.554.000	-	19,91	-	314.554.000	-	6,46	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Laporan	Laporan	10	351.517.693			10	3.035.364.000		50.210.000	-	50.210.000	-	1,65	-	50.210.000	-	14,28	
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumah Lanjut Usia Terlantar yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti	Orang	50	3.603.990.652			50	1.168.803.000		481.642.602	-	481.642.602	-	41,21	-	481.642.602	-	13,36	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan permakanan dalam Panti	Orang	50	2.079.159.318			50	674.288.000		420.959.602	-	420.959.602	-	62,43	-	420.959.602	-	20,25	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan sandang dalam Panti	Orang	50	94.354.749			50	30.600.000		5.463.000	-	5.463.000	-	17,85	-	5.463.000	-	5,79	
	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan asrama dalam Panti	Orang	50	676.825.734			50	219.500.000		13.965.000	-	13.965.000	-	6,36	-	13.965.000	-	2,06	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan Alat Bantu dalam Panti	Orang	50	46.252.328			50	15.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan kesehatan dalam Panti	Orang	50	262.469.628			50	85.121.000		21.095.000	-	21.095.000	-	24,78	-	21.095.000	-	8,04	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan Bimbingan dalam Panti	Orang	50	217.077.593			50	70.400.000		17.100.000	-	17.100.000	-	24,29	-	17.100.000	-	7,88	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari dalam Panti	Orang	50	22.201.117			50	7.200.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan reunifikasi dalam Panti	Orang	50	165.429.160			50	53.650.000		3.060.000	-	3.060.000	-	5,70	-	3.060.000	-	1,85	
	Pemulasaraan	Jumlah Lansia terlantar yang dipenuhi kebutuhan pemulasaraan dalam Panti	Orang	50	40.221.024			50	13.044.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti	Orang	300	17.011.658.368			100	1.578.469.500		30.420.000	-	30.420.000	-	1,93	-	30.420.000	-	0,18	
	Penyediaan Permakanan	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dalam Panti	Orang	300	2.987.823.305			100	968.975.000		29.295.000	-	29.295.000	-	3,02	-	29.295.000	-	0,98	
	Penyediaan Sandang	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dalam Panti	Orang	300	150.242.979			100	48.725.000		1.125.000	-	1.125.000	-	2,31	-	1.125.000	-	0,75	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji	Komoditi	100	280.803.742			20	69.994.700			-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					15.236.014.250				4.629.826.680		38.008.931		38.008.931	-	1,27		38.008.931	-	0,45	
Sasaran : Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Cakupan Air Minum	%	80,59				76,48												
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Cakupan air minum	%	80,59	10.224.348.000			76,48	2.936.368.000		341.649.500	-	341.649.500	-	11,64	-	341.649.500	-	3,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/kota		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Buah	102	10.224.348.000			34	2.936.368.000		341.649.500	-	341.649.500	-	11,64	-	341.649.500	-	3,34	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM										43.500.000	-	43.500.000			-	43.500.000			
	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan										298.149.500	-	298.149.500			-	298.149.500			
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					10.224.348.000				2.936.368.000		341.649.500		341.649.500	-	11,64		341.649.500	-	3,34	
Sasaran : Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	82,46				80,1												
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100	11.865.261.619			94	3.644.234.400		1.876.977.000	-	1.876.977.000	-	51,51	-	1.876.977.000	-		Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					11.865.261.619				3.644.234.400,00		1.876.977.000	-	1.876.977.000			-	1.876.977.000		15,82	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				11.865.261.619				3.644.234.400,00		1.876.977.000	-	1.876.977.000			-	1.876.977.000		15,82	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	253391,4	587.290.665.869			84392,8	256.812.896.004		71.741.059.960	-	71.741.059.960	-	27,94	-	71.741.059.960	-	12,22	Dinas Perumahan dan Permukiman
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		Perencanaan dan penanganan PSU Permukiman yang terlaksana	Ha	978	587.290.665.869			84	2,5837E+11		71.741.059.960	-	71.741.059.960	-	27,77	-	71.741.059.960	-	12,22	
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan PSU Permukiman	Dokumen	3	1.029.079.161			1	450000000		2.500.000	-	2.500.000	-	0,56	-	2.500.000	-	0,24	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah penanganan PSU permukiman	Paket	2931	586.261.586.708			1600	2,5792E+11		71.738.559.960	-	71.738.559.960	-	27,81	-	71.738.559.960	-	12,24	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					599.155.927.488				260.457.130.404		73.618.036.960		73.618.036.960	-	39,72		73.618.036.960	-	6,11	
Sasaran : Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Rasio Elektrifikasi	%	99,99				99,77												
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5,57	1.991.688.898			5,96	557.222.820		12.901.600		12.901.600		2,32		12.901.600		0,65	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PENATAUSAHAAN IZIN, PEMBINAAN, dan PENGAWASAN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) sebagai BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN sampai dengan (SEPULUH RIBU) TON PER TAHUN		Jumlah Izin	Izin	6	214.456.006			1	34.499.220,00	-	3.041.600	-	3.041.600	-	8,82	-	3.041.600	-	1,42	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi	6	131.729.920			1	17.854.610,00	-	3.041.600	-	3.041.600	-	17,04	-	3.041.600	-	2,31	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pengecer Bahan Berbahaya (B2) Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		6	81.583.518			4	75.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Pengecer Terkendali		7	152.289.234			5	140.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Toko Sarana Distribusi Bahan Berbahaya yang Diperiksa		7	81.583.518			5	75.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Pengawasan		7	70.705.716			6	65.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		Jumlah Dokumen Pendukung Ekspor yang diterbitkan Bagi Eksportir		120	-			0	-		-	-	-			-	-	-	-	
	Koordinasi dan singkronisasi layanan penerbitan SKA	Jumlah Calon Eksportir Penerbitan SKA Terlayani		120	-			0	-		-	-	-			-	-	-	-	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	5.179.316.326			4	1.658.499.800		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Komoditi Bapokting Terjamin Ketersediaan Stock dan Harga Di Tingkat Provinsi		22	87.022.420			22	80.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok yang dilaksanakan		8	43.511.210			6	40.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Penting yang dilaksanakan		8	43.511.210			6	40.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		Jumlah Komoditi Bapokting Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi		22	1.717.060.899			22	1.578.499.800,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Bapokting Terpantau Stok dan Harga Di Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi		22	97.900.005			22	89.999.800,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar Di Kabupaten/Kota Terlaksana dalam rangka Stabilisasi Harga Bapok		13	1.619.160.895			9	1.488.500.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengawasan Pupuk Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan penggunaan Pupuk Berbsubsidi di Wilayah Kerjanya dalam sistem informasi perdagangan		Jumlah Stok Pupuk Pestisida yang Terkendali		0	-						-	-	-			-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		0	-						-	-	-			-	-			

[illegible]

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Produk Terverifikasi Mutu		2	79.952.066			2	73.500.200,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Layanan Pengujian								-			-	-			-	-			
	Pengembangan Layanan Sertifikasi											-	-			-	-			
	Pengembangan Layanan Kalibrasi											-	-			-	-			
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	37.550.068.505			100	12.024.131.600	20	2.000.000	20	2.000.000	20,00	0,02	20,00	2.000.000	20,00	0,01	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri		Jumlah Produk Dalam Negeri Terpromosi		60	12.046.221.585			20	11.074.131.600,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Terlaksana		4	12.046.221.585			2	11.074.131.600,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Jenis Produk Dalam Negeri Terpasarkan		14	935.491.011			10	860.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Terlaksana		4	935.491.011			2	860.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UKM Terakomodir di Retail		50	97.900.222			15	90.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Terlaksana		2	81.583.518			2	75.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Viewers yang mengunjungi portal Digital Marketing		40000	16.316.704			30000	15.000.000,00	18.896	2.000.000	18.896	2.000.000	62,99	13,33	18.896,00	2.000.000	47,24	12,26	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					51.588.894.563				16.519.587.900		18.155.000		18.155.000	5,61	1,60		18.155.000	4,26	1,39	
Sasaran : Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup		Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp.000	11943,70147				11273,02017												
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	4.833.875.000			100	3.703.875.000	0	11.680.000	-	11.680.000	-	0,32	-	11.680.000	-	0,24	Dinas Perdagangan
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas		Jumlah Kab/Kota Tersedia Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan		10	4.029.002.055			10	3.703.875.000,00	0		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Jenis Bantuan Sarana Prasarana		9	3.865.835.018			9	3.553.875.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Provinsi		0	-				-	0	-	-	-			-	-			
	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas		2	163.167.037			2	150.000.000,00	0	11.680.000	-	11.680.000	-	7,79	-	11.680.000	-	7,16	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					4.833.875.000				3.703.875.000		11.680.000		11.680.000	-	0,32		11.680.000	-	0,24	
Tujuan : Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan		Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%	4,5				1,5		(0,38)		-0,38		-25,33333333		-25,33333333		-8,444444444		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan (Orang)	Orang	6	971.920.387			0	227.257.250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi	Lembaga	60	7.175.198.742			20	2.015.705.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan (Orang)	Orang	180	237.144.411			0	680.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					131.453.832.370				35.057.051.711		745.081.200		745.081.200	-	2,13		745.081.200	-	0,57	
Sasaran : Menurunnya pengangguran terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17				3,3		3,97										
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	18	3.481.991.780			16	829.654.400	0	9.154.200	-	9.154.200	-	1,10	-	9.154.200	-	0,26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi		300	1.092.070.448			150	192.905.200	0	5.700.200	-	5.700.200	-	2,95	-	5.700.200	-	0,52	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri (Induk)		300	1.092.070.448			150	192.905.200	0	5.700.200	-	5.700.200	-	2,95	-	5.700.200	-	0,52	
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai		40	147.454.000			20	23.454.000	0	3.454.000	-	3.454.000	-	14,73	-	3.454.000	-	2,34	
	Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang di Akreditasi (Induk)		40	147.454.000			20	23.454.000	0	3.454.000	-	3.454.000	-	14,73	-	3.454.000	-	2,34	
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi (BLKDLN)		160	2.044.288.965			96	533.154.900	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (DBHCHT)	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri (BLK)		160	2.044.288.965			96	533.154.900	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah peserta movev yang telah mendapat pekerjaan (formal/informal)		5	92.804.380			100	5.210.800	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta movev yang telah mendapat pekerjaan (formal/informal) (BLKDLN)		5	92.804.380			5	5.210.800	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	57,48	3.391.251.944			44,71	991.936.430	0	55.680.800	-	55.680.800	-	5,61	-	55.680.800	-	1,64	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL		160	910.699.800			160	303.566.600	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal)	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.		160	910.699.800			160	303.566.600	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair		2000	388.974.000			1500	129.658.000	0	1.792.500	-	1.792.500	-	1,38	-	1.792.500	-	0,46	
	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair		2000	388.974.000			1500	129.658.000	0	1.792.500	-	1.792.500	-	1,38	-	1.792.500	-	0,46	
Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi		Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.		27253	1.995.499.514			23460	514.633.200	0	53.888.300	-	53.888.300	-	10,47	-	53.888.300	-	2,70	
	Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia	Jumlah PMI Bermasalah Yang Ditangani		1600	618.360.000			1900	94.120.000	0	1.934.200	-	1.934.200	-	2,06	-	1.934.200	-	0,31	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	11,43	11.105.209.927			10	3.328.089.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	0,60	-	20.000.000	-	0,18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jejaring Deteksi Dini dan Cegah Dini Gangguan Keamanan	Orang	85	3.191.596.561			50	3.328.089.000,00	-	20.000.000	-	20.000.000	-	0,60	-	20.000.000	-	0,63	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jejaring Deteksi Dini	Orang	85	855.085.702			50	1.427.580.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Mediasi Konflik	Kali	20	303.454.832			20	246.829.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dok	1	125.732.088			1	102.270.000,00	1	20.000.000	1	20.000.000	100,00	19,56	1,00	20.000.000	100,00	15,91	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Rekomendasi	6	1.907.323.939			6	1.551.410.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	292.643.073.798			100	87.426.891.700	0,62	7.549.215.500	1	7.549.215.500	0,62	8,63	0,62	7.549.215.500	0,62	2,58	Biro Kesejahteraan Rakyat
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual (Kali)		Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual		2385	100.348.573.728			790	28.240.421.700,00	5	51.755.000	5	51.755.000	0,63	0,18	5,00	51.755.000	0,21	0,05	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual (Kali)	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		2370	89.954.926.705			785	25.527.153.700,00	4	51.755.000	4	51.755.000	0,51	0,20	4,00	51.755.000	0,17	0,06	
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spritual (Lembaga)	Jumlah Kelembagaan Bina Spiritual Yang Terfasilitasi		5	10.393.647.022			5	2.713.268.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (Dokumen)		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar		45	190.236.028.124			15	55.074.371.100,00	-	7.474.175.200	-	7.474.175.200	-	13,57	-	7.474.175.200	-	3,93	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		12	186.708.519.065			4	54.509.775.500,00	-	7.447.614.000	-	7.447.614.000	-	13,66	-	7.447.614.000	-	3,99	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan		24	3.025.514.118			8	502.705.000,00	-	21.646.000	-	21.646.000	-	4,31	-	21.646.000	-	0,72	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sosial		9	501.994.941			3	61.890.600,00	-	4.915.200	-	4.915.200	-	7,94	-	4.915.200	-	0,98	
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (Dokumen)		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		9	2.058.471.946			3	243.536.900,00	-	23.285.300	-	23.285.300	-	9,56	-	23.285.300	-	1,13	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dokumen)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata		3	855.856.277			1	120.751.400,00	-	15.225.300	-	15.225.300	-	12,61	-	15.225.300	-	1,78	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		3	424.296.999			1	40.848.400,00	-	2.277.700	-	2.277.700	-	5,58	-	2.277.700	-	0,54	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan		3	778.318.670			1	81.937.100,00	-	5.782.300	-	5.782.300	-	7,06	-	5.782.300	-	0,74	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Lembaga Adat Aktif	%	70	24.519.090.462			60	6.798.099.800		899.996.000	-	899.996.000	-	13,24	-	899.996.000	-	3,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Bumdes Berprestasi	%	37	-			14,43				-	-	-		-	-	-		
		Persentase Pokja Posyandu aktif	%	100	-			60				-	-	-		-	-	-		
		Persentase Posyantek yang aktif	%	64,96	-			47,86				-	-	-		-	-	-		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					24.613.751.414				6.798.099.800,00		899.996.000	-	899.996.000		13,24	-	899.996.000	-	3,66	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				754.912.008				208.500.000,00		149.996.000	-	149.996.000		71,94	-	149.996.000	-	19,87	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				7.149.034.094				1.974.499.800,00		750.000.000	-	750.000.000		37,98	-	750.000.000	-	10,49	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				15.985.669.094				4.415.100.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				724.136.219				200.000.000,00		-	-	-		-	-	-		-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	81,82	6.405.431.759			63,64	1.975.050.900		118.840.600	-	118.840.600	-	6,02	-	118.840.600	-	1,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi					913.426.285				258.233.000,00		68.840.600	-	68.840.600		26,66	-	68.840.600	-	7,54	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				464.992.000				131.457.000,00		41.840.600	-	41.840.600		31,83	-	41.840.600	-	9,00	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				448.434.285				126.776.000,00		27.000.000	-	27.000.000		21,30	-	27.000.000		6,02	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi											50.000.000	-	50.000.000			-	50.000.000	-		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya										50.000.000	-	50.000.000			-	50.000.000	-		
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi					901.771.154				254.938.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				63.450.607				17.938.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				194.546.962				55.000.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat				643.773.584				182.000.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	1.426.928.736			100	389.516.700			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.426.928.736				389.516.700,00			-	-		-	-	-	-	-	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				1.426.928.736				389.516.700,00			-	-		-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Cakupan pembinaan sejarah	%	100	719.796.541			100	164.312.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi					719.796.541				164.312.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi				78.580.447				17.938.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				641.216.094				146.374.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					337.626.326.533				100.375.148.100		8.623.812.100		8.623.812.100	6,96	8,59		8.623.812.100	4,57	2,55	
Sasaran : Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah								5,41												
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	11.445.268.038			100	2.864.180.600	100	186.132.400	100	186.132.400	100,00	6,50	100,00	186.132.400	100,00	1,63	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100				100				-	-	-		-	-	-		
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	15	5.810.081.702			17	1.415.276.100	3	176.352.300	3	176.352.300	17,65	12,46	3,00	176.352.300	20,00	3,04	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran	Kali	36	2.401.255.636			12	562.216.700	3	72.144.700	3	72.144.700	25,00	12,83	3,00	72.144.700	8,33	3,00	
		Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Sekolah					10				-	-	-		-	-			
		Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat	Kegiatan					10				-	-	-		-	-			
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa							10			8.770.000	-	8.770.000	-	-	-	8.770.000			
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi			15	1.008.191.008			17	252.300.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan	Orang	7	287.369.602			2	71.914.300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia			450	678.041.819			400	169.680.100		84.017.800	-	84.017.800	-	49,52	-	84.017.800	-	12,39	
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			2060	1.027.900.882			675	257.232.400		11.419.800	-	11.419.800	-	4,44	-	11.419.800	-	1,11	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							50			-	-	-	-		-	-			
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				3	199.508.733			1	49.927.100	-	9.780.100	-	9.780.100	-	19,59	-	9.780.100	-	4,90	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			6	-					-	6.618.100	-	6.618.100			-	6.618.100	-		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan nealisasi Angganan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			2	-					-	3.000.000	-	3.000.000			-	3.000.000	-		
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			36	207.814.021			12	52.005.500		162.000	-	162.000	-	0,31	-	162.000	-	0,08	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				120	458.447.988			40	114.726.700		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS										-	-	-			-	-			
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS			5	199.799.242			1	49.999.800		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	86,21	2.436.780.947			51,72	730.272.000		92.325.000	-	92.325.000	-	12,64	-	92.325.000	-	3,79	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Desa/ Kelurahan Bersinar	Desa	10	848.629.511			10	730.272.000,00		92.325.000	-	92.325.000	-	12,64	-	92.325.000	-	10,88	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tim Terpadu P4GN	Orang	26	354.342.992			26	124.542.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Lembaga yang difasilitasi	Lembaga	2	-			2	40.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kampung madani	Desa	2	253.260.060			2	368.680.000,00		92.325.000	-	92.325.000	-	25,04	-	92.325.000	-	36,45	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dok	1	24.102.645.863			1	196.050.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	5.727.596.770			100	1.711.115.100			-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Hukum
		Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%	100				100				-	-	-		-	-	-		Biro Hukum
		Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100				100				-	-	-		-	-	-		Biro Hukum
		Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100				100				-	-	-		-	-	-		Biro Hukum
		Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100				100				-	-	-		-	-	-		Biro Hukum
		Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100				100				-	-	-		-	-	-		Biro Hukum

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100				100				-	-	-		-	-	-		Biro Hukum
Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan		Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah		100	3.900.653.457				781.485.600	286	173.700.400	286	173.700.400		22,23	286,00	173.700.400	-	4,45	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Pengaturan yang terbentuk	Perda	30	937.240.588			10	186.199.900	3	46.590.000	3	46.590.000	30,00	25,02	3,00	46.590.000	10,00	4,97	
			Pergub	90				30		11		11		36,67		11,00		12,22		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Penetapan yang terbentuk	Kept.Gub	2100	468.619.123			700	85.094.400	181	31.970.400	181	31.970.400	25,86	37,57	181,00	31.970.400	8,62	6,82	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Terdokumentasi dan ersosialisasi kepada masyarakat	Produk Hukum/Perda /Pergub	132	1.222.824.592			44	221.188.900	14	51.832.000	14	51.832.000	31,82	23,43	14,00	51.832.000	10,61	4,24	
		Jumlah MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	Naskah	75	-			25				-	-	-		-	-	-		
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang terfasilitasi dan Terevaluasi	Perda	150	1.271.969.154			50	289.002.400	15	43.308.000	15	43.308.000	30,00	14,99	15,00	43.308.000	10,00	3,40	
			Perbup/ Perwal	300				100		51		51		51,00		51,00		17,00		
Bantuan Hukum dan HAM		Terlaksananya fasilitasi penanganan kasus-kasus hukum		100	1.826.943.313			100	344.099.050	23,75	73.029.700	24	73.029.700	23,75	21,22	23,75	73.029.700	23,75	4,00	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Penanganan Masalah Hukum (Litigasi)	Perkara	12	904.765.525			4	160.098.000	4	17.328.000	4	17.328.000	100,00	10,82	4,00	17.328.000	33,33	1,92	
	Fasilitasi Penyelesaian Non Litigasi dan HAM	-Jumlah Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	Perkara	12	922.177.788			4	184.001.050	1	55.701.700	1	55.701.700	25,00	30,27	1,00	55.701.700	8,33	6,04	
		-Jumlah Dokumen Pelaporan Rencana Aksi HAM (RANHAM)	Dokumen	9	-			3		0		-	-	-		-	-	-		
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					19.609.645.754				5.305.567.700		278.457.400		278.457.400	12,42	5,25		278.457.400	6,72	1,42	
Tujuan : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%	85,2				83,74												
Sasaran : Meningkatnya kesadaran politik masyarakat		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	1				0,8												
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	100	43.528.305.431			80	4.653.634.000	20	54.345.200	20	54.345.200	25,00	1,17	20,00	54.345.200	20,00	0,12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Parpol peserta Pemilu yang melaksanakan kegiatan kaderisasi	Parpol	12	33.671.239.086			12	4.653.634.000,00	-	54.345.200	-	54.345.200	-	1,17	-	54.345.200	-	0,16	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganana nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Parpol yang difasilitasi	Parpol	12	33.148.535.457			12	4.200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	Orang	60	279.641.098			60	227.459.000,00	-	9.385.200	-	9.385.200	-	4,13	-	9.385.200	-	3,36	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dok	1	278.062.531			1	226.175.000,00	-	44.960.000	-	44.960.000	-	19,88	-	44.960.000	-	16,17	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang aktif	%	83,01	1.631.097.489			79,66	488.819.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Ormas yang dibina/ berdayakan	Ormas	50	1.600.137.061			50	488.819.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas dan Lembaga yang terfasilitasi	Lembaga	8	1.368.000.489			2	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Sosialisasi	Orang	165	172.786.649			165	140.544.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dok	1	59.349.922			1	48.275.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					45.159.402.920				5.142.453.000		54.345.200		54.345.200	12,50	1,06		54.345.200	10,00	0,12	
Tujuan : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	61,4				59,81												
Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	20,47				18,6												
		Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	100				60												
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	65,28	6.231.111.760			52,17	1.769.040.900			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

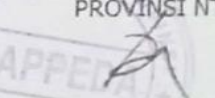
Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah						43,7	1.739.129.900			-	-	-	-	-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perencana PPRG pada Dinas PP Kabupaten Kota di NTB						30	1.608.226.700			-	-	-	-	-	-			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perencana PPRG PD Di provinsi NTB						45	130.903.200			-	-	-	-	-	-			
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		Proporsi kader perempuan di partai politik						38,2	29.911.000			-	-	-	-	-	-			
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kader Parpol Ikut FGD						25	29.911.000			-	-	-	-	-	-			
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	83,07	1.876.538.872			75,52	805.507.900		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					285.696.385			237	81.110.500		-	-	-	-	-	-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan			285.696.385			237	81.110.500		-	-	-	-	-	-	-			
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										-	-	-				-	-		-	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									-	-	-				-	-		-	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					1.590.842.487			15	451.647.400		-	-	-	-	-	-	-		-	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM penyedia layanan yang di latih/bintek			1.238.611.766			30	351.647.500		-	-	-	-	-	-	-			
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan Penyintas/Korban yang menerima Kebutuhan spesifik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.			352.230.722			500	99.999.900		-	-	-	-	-	-	-			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Indeks Ketahanan Keluarga	%	15	1.340.778.150			5	380.653.000		12.820.000	-	12.820.000	-	3,37	-	12.820.000	-	0,96	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga						3	380.653.000		12.820.000	-	12.820.000	-	3,37	-	12.820.000			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Motekar Terlatih						60	263.143.000		12.820.000	-	12.820.000	-	4,87	-	12.820.000			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinenja dan nealisasi Angganan nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki PUSPAGA						50	117.510.000		-	-	-	-	-	-	-			
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Dokumen Gender		1	200.537.840			1	34.997.400		-	-	-	-	-	-	-			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		Data Gender dan Anak			200.537.840			60	34.997.400		-	-	-	-	-	-	-			
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Buku Gender dan Anak			200.537.840			60	34.997.400		-	-	-	-	-	-	-			
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	42	1.490.733.752			80	360.562.500		-	-	-	-	-	-	-			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%								-	-	-			-	-			
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					1.490.733.752			80	360.562.500		-	-	-	-	-	-	-			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				706.027.216			80	170.766.200		-	-	-	-	-	-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				784.706.536			80	189.796.300		-	-	-	-	-	-	-			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		2.001.008.091				517.931.700		-	-	-		-	-	-			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%								-	-	-			-	-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Renstra OPD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kin. Renstra sampai dg Renja Thn Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan nealisasi Anggaran nenstna s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				432.470.145			100	109.237.000,00			-	-	-	-	-	-			
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				432.470.145				109.237.000,00			-	-	-	-	-	-			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.568.537.945				396.194.700,00			-	-	-	-	-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kemampuan aktivis PATBM dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan sebanyak 36 orang			1.169.138.976			72	295.311.100,00			-	-	-	-	-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pemahaman Penyalahgunaan Napza dan PMS sebanyak 300 anak			399.398.969			400	100.883.600,00			-	-	-	-	-	-			
Rata-Rata Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan					13.140.708.464				3.868.693.400		12.820.000		12.820.000	-	0,33		12.820.000	-	0,10	

Mataram, Mei 2021

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI NTB



Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP : 19651231 199403 1 153